

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *FREE CASH FLOW*,
DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA**

**(Studi pada Perusahaan BUMN yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia Tahun
2014-2018)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh:

AZIZAH SETIYAWATI

NIM:1605046063

**PRODI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdri. Azizah Setiyawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Azizah Setiyawati

NIM : 1605046063

Judul Skripsi : **Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Free Cash Flow*, dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus pada Perusahaan BUMN yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)**

Dengan ini kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Semarang, 24 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., CA, CPAI

NIP. 1980001282008011010



Dessy Noor Farida, SE, M.Si, Ak, CA

NIP. 197912222015032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. /Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Azizah Setiyawati
NIM : 1605046063
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh *Good Corporate Governance, Free Cash Flow*, dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan BUMN yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia 2014-2018)

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 16 Maret 2020 Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Akuntansi Syariah.

Semarang, 16 Maret 2020

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Mohammad Nadzir, S.H.I, M.S.I.
NIP. 19730923 200312 1 002

Sekretaris Sidang

Dr. Ratno Agriyanto, SE, MSi, CA, CPA
NIP. 19800128 200801 1 010

Penguji I

Dr. Ari Kristin Prastyoningrum, S.E, M.Si.
NIP. 19790512 200501 2 004

Penguji II

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 19700410 199503 1 001

Pembimbing I

Dr. Ratno Agriyanto, SE, M.Si, CA, CPA
NIP. 19800128 200801 1 010

Pembimbing II

Dessy Noor Farida, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19791222 201503 2 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“O ye that believe! Betray not the trust of Allah and the Messenger, nor
misappropriate knowingly things entrusted to you.”*

(Q.S Al-Anfaal:27)

Never stop learning because life never stop teaching

-Anonymous-

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini aku persembahkan untuk:

Orang tuaku tercinta,
yang selalu memotivasi, mendukung, memberikan semangat dan do'a di setiap langkahku. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan.

Seluruh keluarga besar penulis, terutama kakak sepupu,
yang selalu memberi masukan dan dukungan ketika penulis berkeluh kesah

Sahabat-sahabat, serta teman-teman AKS B 2016,
yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan canda tawa, serta tempat berbagi cerita.

Terimakasih

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azizah Setiyawati
NIM : 1605046063
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Free Cash Flow*, dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus pada Perusahaan BUMN yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)

Semarang, 24 Februari 2020

Deklarator,

Azizah Setiyawati

1605046063

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi meliputi:

A. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | ṭ |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | ẓ |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ‘ |
| 4 | ث | Ts | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | P |
| 6 | ح | h | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Dz | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ‘ |
| 14 | ص | ṣ | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | ḍ | | | |

Hamzah (ء) yang letaknya di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ditengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ا | Fathah | A | A |
| إ | Kasrah | I | I |
| أ | Dhamma | U | U |

Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan tanda huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf | Nama |
|-------|----------------|-------|---------|
| يا | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| وا | Fathah dan wau | Au | A dan U |

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh: قال dibaca qāla

D. Ta Marbuṭah

1. Ta marbuṭah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.

Contoh: الأطفال روضة dibaca rauḍatul aṭfāl

2. Ta marbuṭah mati, transliterasinya adalah h.

Contoh: الأطفال روضة dibaca rauḍah al- aṭfāl

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid, dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربنا dibaca rabbanā

F. Kata Sandang

Kata sandang (... ال) ditulis dengan al-..., misalnya القرآن: al-Quran. Al ditulis huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat.

ABSTRACT

The study aims to determine the effect of good corporate governance, free cash flow, and tax planning existence on the earnings management. The independent variables used in this study are board of independent commissioner, institutional ownership, audit committee, free cash flow, and tax planning. The dependent variable is this study is earnings management in this study is projected with discretionary accruals using a modified Jones model.

Data collected in this study using a documentation method and librarian method. The object of this study is BUMN companies listed in The Indonesian Stock Exchange period 2014-2018. The technique samples in this study used by purposive sampling. The analytical technique in this study used multiple linear regression that using software IBM SPSS 23.

The results of this study show that in partial board of independent commissioner, institutional ownership, audit committee, and tax planning does not have significant effect on earnings management. While free cash flow has a significant negative impact on earnings management.

Keywords: *corporate governance, good corporate governance, free cash flow, tax planning, earnings management, board of independent commissioner, institutional ownership, audit committee*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance*, *free cash flow*, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, *free cash flow* dan perencanaan pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba dalam penelitian ini diproksikan dengan *discretionary accruals* yang diukur dengan model Jones dimodifikasi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Objek dalam penelitian adalah perusahaan milik BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software* IBM SPSS 23.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan *free cash flow* menunjukkan pengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Kata kunci: *corporate governance*, *good corporate governance*, *free cash flow*, perencanaan pajak, manajemen laba, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT yang menguasai seluruh alam atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Free Cash Flow*, dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus pada Perusahaan BUMN yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan studi jenjang Strata 1 Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis dengan setulus hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si, Akt, CA, CPAI selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah sekaligus Wali Dosen dan Warno, SE.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan selama penyusunan skripsi

5. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si, Akt, CA, CPAI selaku Dosen Pembimbing I, dan Dessy Noor Farida, SE, M.Si, Akt, CA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Sahabat-sahabat penulis yang tidak lelah selalu menjadi tempat cerita dan keluh kesah serta berbagi energi positif selama ini
8. Teman-teman seperjuangan kelas AKS B 2016 yang telah menemani dan saling berbagi semangat sejak awal perkuliahan hingga saat ini.

Semoga amal baik semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini akan mendapat pahala dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 24 Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| SURAT PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| DEKLARASI | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| <i>ABSTRACT</i> | ix |
| ABSTRAK | x |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 11 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 12 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 12 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian | 12 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA | 15 |

| | |
|--|----|
| 2.1 Kerangka Teori..... | 15 |
| 2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>) | 15 |
| 2.1.2 Manajemen Laba..... | 19 |
| 2.1.2.1 Definisi Manajemen Laba | 21 |
| 2.1.2.2 Motivasi Manajemen Laba | 22 |
| 2.1.2.3 Bentuk-Bentuk Manajemen Laba..... | 25 |
| 2.1.2.4 Pengukuran Manajemen Laba | 26 |
| 2.1.3 <i>Good Corporate Governance</i> | 28 |
| 2.1.3.1 Definisi <i>Good Corporate Governance</i> | 31 |
| 2.1.3.2 Asas <i>Good Corporate Governance</i> | 33 |
| 2.1.3.3 Organ <i>Good Corporate Governance</i> | 35 |
| 2.1.4 <i>Free Cash Flow</i> | 40 |
| 2.1.5 Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) | 42 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 46 |
| 2.3 Rumusan Hipotesis | 52 |
| 2.3.1 Pengaruh Hubungan antara Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba | 52 |
| 2.3.2 Pengaruh Hubungan antara Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba | 53 |
| 2.3.3 Pengaruh Hubungan antara Komite Audit terhadap Manajemen Laba | 54 |
| 2.3.4 Pengaruh Hubungan antara <i>Free Cash Flow</i> terhadap ManajemenLaba .. | 55 |
| 2.3.5 Pengaruh Hubungan antara Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba | 56 |

| | |
|--|-----------|
| 2.4 Model Kerangka Pikir | 57 |
| BAB III: METODOLOGI PENELITIAN | 58 |
| 3.1 Jenis dan Sumber Data | 58 |
| 3.2 Populasi dan Sampel | 59 |
| 3.2.1 Populasi..... | 59 |
| 3.2.2 Sampel..... | 59 |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data | 60 |
| 3.3.1 Studi Dokumentasi..... | 60 |
| 3.3.2 Studi Kepustakaan | 61 |
| 3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran | 61 |
| 3.4.1 Variabel Dependen..... | 61 |
| 3.4.2 Variabel Independen | 62 |
| 3.5 Teknik Analisis Data..... | 65 |
| 3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif | 66 |
| 3.5.2 Uji Asumsi Klasik..... | 66 |
| 3.5.2.1 Uji Normalitas | 66 |
| 3.5.2.2 Uji Multikolinearitas | 67 |
| 3.5.2.3 Uji Autokorelasi | 67 |
| 3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas | 68 |
| 3.5.3 Model Agresi Linier Berganda | 68 |
| 3.5.4 Uji Hipotesis | 69 |
| 3.5.4.1 Uji Signifikansi Individual (Uji t)..... | 69 |

| | |
|---|------------|
| 3.5.4.2 Pengukuran Koefisien Determinasi | 70 |
| BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 71 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 71 |
| 4.1.1 Gambaran Objek Penelitian | 71 |
| 4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian | 72 |
| 4.1.3 Analisis Data | 73 |
| 4.1.3.1 Uji Asumsi Klasik | 73 |
| 4.1.3.2 Pengujian Hipotesis | 81 |
| 4.1.3.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda | 83 |
| 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian | 85 |
| 4.2.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba | 85 |
| 4.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba | 87 |
| 4.2.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba | 89 |
| 4.2.4 Pengaruh <i>Free Cash Flow</i> terhadap Manajemen Laba | 91 |
| 4.2.5 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba | 93 |
| BAB V: PENUTUP | 95 |
| 5.1 Kesimpulan | 95 |
| 5.2 Keterbatasan | 96 |
| 5.3 Saran | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA | 99 |
| LAMPIRAN | 106 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 128 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Daftar Perusahaan yang Terkena Kasus Manajemen Laba..... | 7 |
| Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu | 46 |
| Tabel 4.1 Sampel Penelitian..... | 71 |
| Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif | 72 |
| Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas: Uji Kolmogorov Smirnov | 74 |
| Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas | 77 |
| Tabel 4.5 Pengambilan keputusan dalam uji Durbin Watson | 78 |
| Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi: Uji Durbin Watson..... | 78 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi: Uji Run Test..... | 79 |
| Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas: Uji Glejser | 80 |
| Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi | 81 |
| Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik t..... | 81 |
| Tabel 4.11 Analisis Regresi Linier Berganda | 84 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritik | 57 |
| Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas: Normal Probability | 75 |
| Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas: Histogram..... | 76 |
| Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas: Scatterplot | 80 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1 Perhitungan Variabel Independen | 106 |
| Lampiran 2 Perhitungan Total AkruaI | 115 |
| Lampiran 3 Perhitungan Non Discretionary Accruals | 119 |
| Lampiran 4 Perhitungan Discretionary Accruals | 121 |
| Lampiran 5 Output Hasil Pengujian dengan SPSS 23 | 123 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan bagian penting dalam setiap entitas usaha yang berisi mengenai informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal sebagai pemakai laporan keuangan perusahaan. Pihak internal dalam hal ini yaitu manajemen, yang memerlukan informasi keuangan untuk perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian operasi perusahaan. Sedangkan pihak eksternal terdiri dari investor, kreditur, pelanggan, *supplier*, lembaga pemerintah, serta masyarakat umum. Laporan ini disusun oleh manajemen guna menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan dan ekonomi perusahaan pada suatu periode tertentu.¹

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1, laporan keuangan bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.²

Salah satu komponen dalam laporan keuangan yaitu laporan laba rugi yang berisi mengenai informasi laba dari suatu entitas. Laporan laba rugi memberikan tolak ukur keberhasilan operasional perusahaan dalam suatu periode tertentu dengan membandingkan antara pendapatan dan beban pada

¹ Riska Nirwanan Sari, Arief Tri Hardiyanto, dan Patar Simamora, "Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)* 5, no. 5 (2018): 2.

² Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).1.3

periode tersebut. Laba menjadi salah satu indikator dalam menilai kinerja suatu entitas. Informasi laba merupakan komponen dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, serta membantu mengestimasi kemampuan laba dalam jangka panjang. Informasi laba menjadi perhatian utama untuk mengukur kinerja manajemen, dan sebagai indikator terkait efisiensi penggunaan dana yang ditanam dalam suatu entitas yang diwujudkan dalam tingkat pengembalian (*return*) dan indikator untuk kenaikan kemakmuran oleh investor atau pihak lain yang berkepentingan.³

Karena begitu pentingnya laba dalam hal penilaian manajemen sebagai bentuk tanggung jawabnya, maka seringkali timbul perilaku opportunistik (*behavior opportunistic*). Manajer menggunakan laporan keuangan guna mempertanggungjawabkan yang telah dilaksanakan dan dialami selama mengoperasikan entitas tersebut. Di sisi lain, laporan keuangan digunakan *stakeholder* untuk melihat, menilai, serta meminta pertanggungjawaban manajer atas apa yang telah dilaksanakan dan dialami selama mengoperasikan entitas tersebut serta sebagai bahan untuk pengambilan keputusan ekonomik. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disajikan secara valid agar dapat digunakan prinsipal untuk membuat keputusan. Apabila laporan keuangan disusun tanpa memperhatikan syarat maupun kaidahnya maka akan diragukan valid tidaknya informasi tersebut.⁴

Konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*), dimana manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik, namun di sisi lain manajer mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraannya, sehingga manajer tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan. Manajer sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perusahaan tentunya lebih banyak mengetahui informasi terkait kondisi perusahaan daripada pemilik

³ Dian Agustia, "Pengaruh Free Cash Flow dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba," *AKRUAL* 4, no. 2 (2013): 105–18, <https://doi.org/10.9744/jak.15.1.27-42>.

⁴ Sri Sulistiyanto, *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris* (Jakarta: PT Grasindo, 2008).31

sehingga memunculkan asimetri informasi.⁵ Adanya asimetri informasi dan munculnya perilaku opportunistik dari manajemen untuk melakukan manipulasi dalam menunjukkan informasi laba disebut sebagai manajemen laba (*earnings management*).

Manajemen laba merupakan intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan diri sendiri. Praktik manajemen laba dapat mengikis kepercayaan investor dalam kualitas pelaporan keuangan dan menghambat kelancaran arus modal di pasar keuangan.⁶

Dengan demikian, laporan keuangan merupakan mekanisme bagi manajer untuk berkomunikasi dengan investor luar. Kualitas laporan keuangan berpengaruh dalam pengambilan keputusan investasi oleh investor maupun pihak lain yang berkepentingan. Konflik kepentingan manajer dan investor yang terjadi dalam suatu entitas tersebut dapat diminimalkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan tersebut.⁷

Mekanisme monitoring dilakukan melalui penerapan *good corporate governance*. *Good corporate governance* merupakan suatu sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang tercermin dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengelola perusahaan ,maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Dengan demikian, *good corporate governance* dirancang guna

⁵ Elfrida Ambarita dan Dian Anita Nuswantara, “Pengaruh Penerapan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” *AKRUAL* 1, no. 1 (2009): 28–44, <http://dx.doi.org/10.26740/jaj.v1n1.p28-44>.

⁶ Eva Rosa Dewi Sutino dan Moh Khoiruddin, “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Masuk dalam JII (Jakarta Islamic Index) Tahun 2012-2013,” *Management Analysis Journal* 5, no. 3 (2016): 156–66, <https://doi.org/10.15294/maj.v5i3.8274>.

⁷ Gunawan dan Elona Meita Situmorang, “Pengaruh Dewan Komisaris , Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2015,” *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan* 2, no. 2 (2016): 55–62, <http://dx.doi.org/10.35384/jemp.v2i2.102>.

meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.⁸ Sehingga, penerapan *good corporate governance* dapat meminimalkan segala perbuatan yang menyimpang dalam suatu perusahaan.

Menurut Kementerian Negara BUMN dalam keputusan KEP-117/MBU/2002 tentang prinsip dasar *good corporate governance* antara lain: transparansi (*transparency*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*).⁹ Adapun mekanisme penerapan *good corporate governance* terdapat beberapa unsur didalamnya yang terbagi menjadi tiga, yaitu: a.) mekanisme *governance* spesifik perusahaan yang terdiri atas struktur kepemilikan saham, pembiayaan perusahaan, auditing, komite audit, dewan direksi, dan kompensasi manajemen. b.) mekanisme *governance* spesifik negara yang terdiri dari lingkungan hukum, lingkungan budaya, penyusunan standar akuntansi, dan praktik akuntansi. c.) mekanisme *governance* pasar terdiri dari pasar bagi pengendalian perusahaan, dan tingkat pengembalian pasar modal.¹⁰ Dalam penelitian ini berfokus pada dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit.

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.¹¹ Hayati

⁸ Dedi Kusmayadi, *Good Corporate Governance* (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015).8

⁹ Kementerian BUMN, “Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara,” in *Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang* (Jakarta: Kementerian BUMN, 2002), 3.

¹⁰ Kusmayadi, *Good Corporate Governance*.9

¹¹ Hikmah Is’ada Rahmawati, “Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan,” *Accounting Analysis Journal* 2, no. 1 (2013): 9–18, <https://doi.org/10.15294/aaj/v2i1.1136>.

dan Gusnardi (2012) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba.¹² Hikmah Is'tada Rahmawati (2013) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.¹³ Sedangkan Eny Kusumawati (2019) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.¹⁴

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham institusional. Hayati dan Gusnardi (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba.¹⁵ Evi Octavia (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.¹⁶ Eny Kusumawati (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.¹⁷

Free cash flow merupakan arus kas yang melebihi dari jumlah yang dibutuhkan setelah perusahaan mendanai semua proyek atau investasi modal kerja yang relevan. Salah satu penyebab permasalahan antara manajemen dan pemegang saham adalah konflik kepentingan berkaitan dengan penggunaan

¹² Annur Fitri Hayati dan Gusnardi, "Pengaruh Penerapan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada BUMN Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2009)," *Jurnal Akuntansi* 16, no. 3 (2012): 364–379.

¹³ Is'ada Rahmawati, "Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan."

¹⁴ Eny Kusumawati, "Determinan Manajemen Laba: Kajian Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Go Publik Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 4, no. 1 (2019): 25–42, <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i1.6935>.

¹⁵ Fitri Hayati dan Gusnardi, "Pengaruh Penerapan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi pada BUMN di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2009)."

¹⁶ Evi Octavia, "Implikasi Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8, no. 1 (2017): 126–36, <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7044>.

¹⁷ Kusumawati, "Determinan Manajemen Laba: Kajian Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Go Publik Di Bursa Efek Indonesia."

dari arus kas bebas perusahaan.¹⁸ Dian Agustia (2013) *free cash flow* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.¹⁹ Indah, *et al.*(2018) menyatakan bahwa *free cash flow* berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.²⁰ Bella dan Sistya (2018) menyatakan bahwa *free cash flow* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.²¹

Perencanaan pajak merupakan rangkaian strategi guna mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak sedemikian rupa agar hutang pajaknya, baik berupa pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal sepanjang tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.²² Plasa Negara dan Suputra (2017) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.²³ Sedangkan penelitian Eny Kusumawati (2019) menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.²⁴

¹⁸ Michael C Jensen, "Agency Costs of Free Cash Flow , Corporate Finance , and Takeovers Agency Costs of Free Cash Flow , Corporate Finance , and Takeovers," *American Economic Review* 76, no. 2 (1986): 323–329.

¹⁹ Agustia, "Pengaruh Free Cash Flow dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba."

²⁰ Vika Indah.R, Afrizal, dan Enggar Diah P.A, "Determinan Manajemen Laba pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan UNJA* 3, no. 4 (2018): 35–52.

²¹ Bella N. L. Putri, and Sistya Rachmawati, "Analisis Financial Distress Dan Free Cash Flow Dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Manajemen Laba," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 14, no. 2 (2018): 54–61.

²² Nirwanan Sari, Tri Hardiyanto, dan Simamora, "Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017."

²³ Gede R.P Negara, Dharma Suputra, "Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 20, no. 3 (2017): 2045-2072

²⁴ Kusumawati, "Determinan Manajemen Laba: Kajian Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Go Publik Di Bursa Efek Indonesia."

Berdasarkan hasil-hasil penelitian diatas masih menunjukkan hasil penelitian yang bervariasi dan tidak konsisten. Selain itu, terkuaknya indikasi adanya praktik manajemen laba pada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam beberapa kurun waktu ini, ditengah-tengah berbagai upaya perusahaan pemerintah maupun swasta dalam mengimplementasikan *good corporate governance* tentunya menjadi masalah tersendiri. Adapun skandal keuangan yang pernah melibatkan perusahaan di Indonesia antara lain:

Tabel 1.1

Daftar Perusahaan yang Pernah Terkena Kasus Manajemen Laba

| Perusahaan | Tahun |
|------------------------------------|--------------|
| PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 2009 |
| PT Bumi Resources Tbk | 2012 |
| PT Timah (Persero) Tbk | 2015 |
| PT Bank Bukopin Tbk | 2017 |
| PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 2018 |
| PT Asuransi Jiwasraya (Persero) | 2019 |

Sumber : Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas diantara perusahaan yang terkena kasus manajemen laba dalam beberapa kurun waktu terakhir sebagian merupakan perusahaan milik BUMN. Kementerian BUMN menemukan kelebihan pencatatan (*overstate*) laba bersih PT Waskita Karya (Persero) sejak tahun 2004 hingga 2007 dengan total hampir Rp 500 miliar. Menurut laporan keuangan Waskita, mereka berhasil mencetak laba selama empat tahun

terakhir yakni semenjak tahun 2004 hingga 2007, masing-masing sebesar 52,68 miliar, Rp 50,28 miliar, Rp 54,85 miliar, dan Rp 34,1 miliar.²⁵

PT Bumi Resources Tbk sebagai salah satu anak perusahaan dari PT Bakrie and Brothers melakukan pelanggaran pada tahun 2012 dengan melakukan manipulasi laporan keuangan. Pada tahun 2011, PT Bumi Resources Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 3,14 triliun. Kemudian, PT Bumi Resources melakukan pemecahan saham sebagai akibat adanya kerugian tersebut. BAPEPAM menilai bahwa PT Bumi Resources Tbk melakukan manipulasi tersebut agar perusahaan tidak memiliki kewajiban dalam melaporkan laporan keuangan perusahaan kepada BAPEPAM.²⁶

PT Timah Tbk melakukan pelaporan keuangan fiktif pada semester 1 tahun 2015. Laporan keuangan perusahaan menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan strategi yang tepat dan menghasilkan kinerja yang positif dengan membukukan laba, namun berdasarkan realita, PT Timah Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 59 miliar. Pemalsuan laporan keuangan dilakukan untuk menutupi kinerja perusahaannya yang kurang sehat selama tiga tahun terakhir. Kinerja yang kurang sehat dapat terlihat dari meningkatnya hutang perusahaan, dimana pada tahun 2013, hutang perusahaan sebesar Rp 263 miliar dan meningkat menjadi Rp 2,3 triliun pada tahun 2015.²⁷

PT Bank Bukopin Tbk melakukan *restated* (penyajian kembali) atas laporan tahunan tahun 2016 pada 25 April 2018. Dalam *restated* tersebut,

²⁵ Kontan.co.id, “Kementerian BUMN Akan Tindak Auditor Waskita Karya,” diakses 31 Januari 2020, <https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/kementerian-bumn-akan-tindak-auditor-waskita-karya-1>.

²⁶ Neraca.co.id, “BAPEPAM Endus ada Penyelewengan Keuangan di Grup Bakrie-Konflik Manajemen Internal Muncul,” diakses 31 Januari 2020, <http://www.neraca.co.id/article/19651/bapepam-endus-ada-penyelewengan-keuangan-di-grup-bakrie-konflik-internal-manajemen-muncul>.

²⁷ Tambang.co.id, “PT dikses pada 31 Januari 2020Timah Diduga Membuat Laporan Keuangan Fiktif,” diakses 31 Januari 2020, <http://www.tambang.co.id/pttimah-diduga-membuat-laporan-keuangan-fiktif-9640/>.

laba tahun 2016 yang sebelumnya tercatat sebesar Rp 1,08 triliun berubah menjadi Rp 183,53 miliar.²⁸ Selain laba yang berubah, bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit turun dari Rp 1,06 triliun menjadi Rp 317,88 miliar. Revisi juga terjadi pada pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin terkait penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai debitur tertentu. Akibatnya, beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan di revisi meningkat dari Rp 649,05 miliar menjadi Rp 797,65 miliar, sehingga menyebabkan beban perseroan meningkat Rp 148,6 miliar. Manajemen menyatakan perubahan tersebut dipicu adanya pencatatan tidak wajar dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit yang telah terjadi sejak waktu lima tahun sebelumnya. Selama jangka waktu tersebut perusahaan mencatat memperoleh pendapatan dari kartu kredit, padahal kenyataannya tidak menerima pendapatan dari 100.000 kartu kredit. Bukopin melakukan sejumlah langkah untuk menyehatkan rasio kecukupan modal yang turun tajam sebagai akibat dari revisi tersebut dengan melakukan *right issue* melalui penerbitan saham baru sebesar 30% dan divestasi 40% saham PT Bank Syariah Bukopin selaku anak usahanya.²⁹

Kasus yang terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bermula saat pelaporan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia dimana dalam laporan keuangannya dilaporkan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berhasil memperoleh laba bersih sebesar US\$ 809.000, namun dua komisaris menyatakan keberatan atas laporan tersebut. Hal tersebut terkait dengan pencatatan pendapatan piutang oleh Garuda Indonesia dalam bentuk laba perusahaan tahun buku 2018 dimana Garuda

²⁸ Kompas.com, "Laporan Keuangan Bukopin 'Tersandung' Kasus Kartu Kredit, Ini Penjelasan Dirut," diakses 30 Januari 2020, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/03/070000026/laporan-keuangan-bukopin-tersandung-kasus-kartu-kredit-ini-penjelasan-dirut?amp=1&page=2>.

²⁹ Detik.com, "Bank Bukopin Permak Laporan Keuangan Ini Kata BI dan OJK," diakses 30 Januari 2020, <https://m.detik.com/finance/moneter/d-3994551/bank-bukopin-permak-laporan-keuangan-ini-kata-bi-dan-ojk>.

Indonesia mengklaim laba senilai US\$ 5,01 juta dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi. Maskapai kemudian dinyatakan bersalah dan dikenai denda serta kewajiban penyajian kembali (*restated*) laporan keuangan pada tahun buku 2018 kembali oleh Bursa Efek Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam laporan terbarunya, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ternyata mencatatkan rugi sebesar US\$ 175,02 juta setelah piutang Mahata tidak dicantumkan dalam pendapatan.³⁰

Kasus terakhir, terjadi ketika Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa PT Asuransi Jiwasraya dan hasil temuan yang paling menonjol ialah Jiwasraya telah melakukan pembukuan laba semu sejak tahun 2006 melalui aktivitas rekayasa akuntansi. Hingga saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan bersama Kejaksaan Agung terus mengusut kasus tersebut dan menghitung kerugian negara akibat kasus Jiwasraya.³¹ Sedangkan permasalahan dalam Jiwasraya telah dimulai sejak tahun 2004 dengan melaporkan cadangan yang lebih kecil dari yang seharusnya mencapai Rp 2,769 triliun. Permasalahan terus berlanjut hingga pada tahun 2019 dimana Dirut Jiwasraya menyatakan membutuhkan suntikan modal Rp 32,89 triliun untuk memenuhi rasio kecukupan modal berbasis risiko. Aset perusahaan tercatat hanya sebesar Rp 23,26 triliun, sedangkan kewajiban sebesar Rp 50,5 triliun, serta ekuitas negatif Rp 27,24 triliun. Selain itu liabilitas JS Saving Plan yang bermasalah sebesar Rp 15,75 triliun, dan gagal bayar atas produk JS Saving Plan mencapai Rp 12,4 triliun.³²

³⁰ Bisnis.com, “Audit BPK terhadap Garuda Indonesia, Ada Temuan Terkait Mahata,” diakses 22 Desember 2019, <https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20190922/98/1151048/audit-bpk-terhadap-garuda-indonesia-ada-temuan-terkait-mahata>.

³¹ Kompas.com, “5 Fakta Baru Kasus Jiwasraya, Laba Semu hingga Janji Jaksa Agung Ungkap Tersangka,” diakses 30 Januari 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/07172091/5-fakta-baru-kasus-jiwasraya-laba-semu-hingga-janji-jaksa-agung-ungkap?page=all>.

³² CNBC Indonesia, “Bobrok dari 2004, Ini Kronologi Jiwasraya Hingga Default,” diakses 30 Januari 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191228185156-17-126264/bobrok-dari-2004-ini-kronologi-jiwasraya-hingga-default>.

Berdasarkan hasil penelitian dan fenomena yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang manajemen laba. Penelitian ini menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen, dan tiga organ dari *good corporate governance* yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, serta *free cash flow*, dan perencanaan pajak sebagai variabel independen. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan *go public* milik BUMN yang terdaftar (*listing*) di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, FREE CASH FLOW, DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA (STUDI PADA PERUSAHAAN BUMN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2018)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
3. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
4. Apakah *free cash flow* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
5. Apakah perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh peneliti sebelum melakukan penelitian dan mengacu pada permasalahan. Adapun tujuan penelitian berdasar perumusan permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018
2. Menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018
3. Menguji secara empiris pengaruh komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018
4. Menguji secara empiris pengaruh *free cash flow* terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018
5. Menguji secara empiris pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu sebagai sarana untuk menerapkan serta membandingkan antara ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya secara langsung pada obyek penelitian, sehingga dapat menambah

pengetahuan dan wawasan informasi, serta menambah pengalaman untuk masuk dalam dunia kerja.

2. Bagi Instansi

Manfaat penelitian ini untuk instansi adalah memberikan kontribusi informasi pengaruh *good corporate governance*, *free cash flow*, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba, pada saham-saham milik BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi Akademisi

Manfaat penelitian bagi kalangan akademisi ialah diharapkan dapat memberikan kontribusi, menambah perbendaharaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas tentang permasalahan yang sama yaitu mengenai ilmu Akuntansi Syariah.

4. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan informasi bagi masyarakat tentang pengaruh *good corporate governance*, *free cash flow*, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba, pada saham-saham milik BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga masyarakat tertarik dan dapat ikut serta berinvestasi di pasar modal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi terkait dengan kerangka teori, penelitian terdahulu, rumusan hipotesis, dan model kerangka pikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, serta teknik analisis data

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan memuat mengenai hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta keterbatasan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling dalam penelitiannya pada tahun 1976. Teori keagenan merupakan hubungan kontrak kerja antara prinsipal dan agen, dimana dalam hubungan kontrak kerja tersebut pihak prinsipal sebagai pemilik sekaligus investor mendelegasikan tugas kepada agen untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Agen merupakan pihak yang mendapat tanggung jawab secara moral dan profesional untuk menjalankan tujuan perusahaan sebaik mungkin demi optimalisasi laba dan kinerja perusahaan. Kontrak kerja yang didalamnya dijelaskan mengenai tanggung jawab secara moral dan profesional manajer atas dana yang diinvestasikan prinsipal serta sistem pembagian hasil berupa keuntungan dan risiko oleh prinsipal kepada agen yang telah disepakati bersama.³³

Agency conflict merupakan pemisahan yang terjadi antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Teori agensi merupakan teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan dimana yang mengelola sebuah perusahaan tidak dilakukan oleh pemilik melainkan diserahkan kepada pihak lain. Hal tersebut akan menimbulkan potensi konflik akibat adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, yaitu

³³ Tegar Rahardi, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 – 2012),” *Skripsi Sarjana Studi Akuntansi* (Universitas Diponegoro, 2013).11

antara pihak pengendali perusahaan dan pemilik perusahaan yang sering disebut dengan *agency problem*.³⁴

Agency problem merupakan masalah keagenan yang muncul akibat adanya asimetri informasi. Terdapat dua jenis permasalahan yang ditimbulkan oleh asimetri informasi yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* merupakan suatu keadaan yang disebabkan karena ketimpangan informasi tentang keadaan perusahaan antara prinsipal dan manajer, sehingga informasi yang mungkin dapat memengaruhi keputusan prinsipal tidak disampaikan oleh manajer. Sedangkan, *moral hazard* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajer yang tidak seluruhnya diketahui oleh prinsipal, sehingga manajer dapat melakukan tindakan yang melanggar kesepakatan kontrak kerja dan cenderung bertindak oportunistik.³⁵

Agency cost muncul tidak terlepas dari adanya asimetri informasi atau konflik kepentingan yang muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa mendatang daripada pihak prinsipal. Oleh karena itu prinsipal perlu menciptakan suatu sistem yang dapat memonitor perilaku agen agar bertindak sesuai dengan harapannya. Aktivitas tersebut akan menimbulkan *agency cost* yang terdiri atas biaya untuk penciptaan standar, biaya monitoring agen, penciptaan sistem informasi akuntansi, dan lain sebagainya.³⁶

Eisenhardt (1989) dalam Tegar Rahardi (2013) menyatakan dalam teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: Pertama, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self*

³⁴ Kusumawati, "Determinan Manajemen Laba: Kajian Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Go Publik Di Bursa Efek Indonesia."

³⁵ L.M.D Parama Yogi dan I.G.A Eka Damayanthi, "Pengaruh Arus Kas Bebas, Capital Adequacy Ratio dan Good Corporate Governance pada Manajemen Laba," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 15, no. 2 (2016): 1056–1085.

³⁶ Mariska Dewi Anggraeni, "Agency Theory Dalam Perspektif Islam," *JHI (Jurnal Hukum Islam)* 9, no. 2 (2011): 1–13.

interest). Kedua, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*). Ketiga, manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer akan bertindak oportunistik, yaitu mengutamakan kepentingan sendiri. Manajer sebagai agen berupaya untuk memaksimalkan keuntungan untuk kepentingan pribadinya sendiri atas tanggung jawab besar yang diberikan oleh pihak prinsipal perusahaan.³⁷

Dalam pandangan Islam hal tersebut tentulah tidak diperbolehkan sebab telah mengkhianati amanat, seperti yang terdapat dalam firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*” (Q.S Al-Anfaal:27)

Ayat diatas menurut tafsir dari Kementerian Agama bahwa Allah SWT menyerukan kepada kaum Muslimin agar tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, tidak pula mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada mereka, yaitu mengkhianati segala macam urusan yang menyangkut ketertiban umat, seperti urusan pemerintahan, perang, perdata, kemasyarakatan dan tata tertib hidup bermasyarakat. Untuk mengatur segala macam urusan yang ada diperlukan adanya peraturan, dimana peraturan secara prinsip telah diberikan ketentuannya secara garis besar dalam Al-Quran dan Hadis. Maka segenap yang terkait dengan segala urusan kemasyarakatan itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan, dan segenap peraturan yang menyangkut kepentingan umat tidak boleh

³⁷ Rahardi, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 – 2012).”¹²

dikhianati, dan wajib ditaati. Hampir seluruh kegiatan dalam masyarakat berhubungan dengan kepercayaan, maka Allah melarang kaum Muslimin mengkhianati amanat, karena apabila amanat sudah tidak terpelihara lagi berarti hilanglah kepercayaan. Apabila kepercayaan telah hilang berarti ketertiban hukum tidak akan terpelihara lagi dan ketenangan hidup bermasyarakat tidak dapat dinikmati lagi. Allah menegaskan bahwa bahaya yang akan menimpa masyarakat lantaran mengkhianati amanat yang telah diketahui, baik di dunia yaitu merajalelanya kejahatan dan kemaksiatan yang mengguncangkan hidup bermasyarakat, ataupun penyesalan yang abadi dan siksaan api neraka yang akan menimpa mereka di akhirat. Khianat adalah sifat orang-orang munafik, sedang amanah adalah sifat orang-orang mukmin. Maka orang mukmin harus menjauhi sifat khianat itu agar tidak kejangkitan penyakit nifak yang dapat mengikis habis imannya.³⁸

Pihak agen dan prinsipal dalam menjalankan hubungan kontrak kerja hendaknya saling menjaga amanat dan tidak saling berkhianat. Sebab apabila hubungan kontrak antara agen dan prinsipal seimbang maka secara sistematis akan menunjukkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian imbalan khusus oleh prinsipal kepada agen sehingga hubungan agen-prinsipal yang ideal dapat terwujud. Selain itu akan muncul kepercayaan antar pihak agen dan prinsipal dan dengan demikian melaksanakan hubungan kontrak dilaksanakan dengan penuh dengan tanggung jawab dan bebas dari praktik kecurangan, dan selanjutnya dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas baik dan valid untuk pengambilan keputusan.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf UII, 1995).459

2.1.2 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan sebuah aktivitas manajerial yang dilakukan manajer untuk “mempercantik” laporan keuangan. Berdasarkan perspektif Islam, keputusan bisnis dan manajemen dipandu oleh keyakinan atau iman dalam praktiknya berarti mematuhi perintah Allah dan terlibat dalam kegiatan yang diperbolehkan (halal) dan menghindari yang dilarang (haram). Islam menetapkan manajer muslim sebagai orang yang menganggap akuntabilitas kepada Allah menjadi hal yang sangat penting dalam segala pengambilan keputusan. Sehingga, seorang manajer seharusnya mengungkapkan informasi yang akurat dan benar dalam laporan keuangan.³⁹

Dalam penelitian Muliasari dan Dianati (2014), pihak akademisi keuangan, perbankan dan ekonomi Islam menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian manajemen laba dengan etika bisnis Islam berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 135 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa’:135)

³⁹ Nurul Ainun, “Praktik Manajemen Laba Efisien dan Kesesuaian Nilai-Nilai Islam pada Perbankan Syariah di Indonesia,” *Skripsi Sarjana Studi Akuntansi* (UIN Alauddin Makassar, 2016).31

Berdasar tulisan Muliasari dan Dianati (2014), para narasumber berpendapat bahwa pada intinya seorang muslim itu harus bersaksi apa adanya, sekalipun itu merugikan dirinya dan merugikan keluarganya, sebab itu sudah menjadi prinsip umum dari kesaksian. Artinya seorang muslim dalam bersaksi tidak terbatas pada kesaksian di pengadilan saja, tapi juga ketika transaksi termasuk dalam pelaporan keuangan. Transaksi dibutuhkan kesimetrisan informasi antara pembeli dan penjual, tidak diperkenankan menyembunyikan informasi. Artinya yang menjadi *concern* Islam adalah informasi yang simetris, tidak boleh menyembunyikan informasi yang memungkinkan orang untuk berubah pikiran. Dalam etika dalam Islam, logikanya harus menyajikan apa adanya.⁴⁰

Menurut Marzuki dan Latif (2010), bisnis islami merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikannya termasuk profitnya, namun dibatasi cara memperolehnya dan menggunakan hartanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah: 188)

Dari paparan diatas, Islam memandang bahwa para manajer maupun akuntan harus memiliki akhlak atau sifat jujur, menepati amanah, dan jujur dalam melaporkan hasil dari laporan keuangan kepada para penggunanya. Kejujuran merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam berbisnis karena kejujuran akan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak.

⁴⁰ Indah Muliasari dan Dalili Dianati, “Manajemen Laba Dalam Sudut Pandang Etika Bisnis Islam,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 2, no. 2 (2014): 175–176.

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

Artinya: “ Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya.” (QS. Al- A’raf : 85)

Islam juga tidak memperbolehkan untuk berbuat curang atau penipuan yang mana dari perbuatan tersebut akan berdampak merugikan pihak yang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil.” (QS. An Nisa : 29)

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 42)

Selain dari sifat *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, *fathanah* yang harus dimiliki oleh para pelaku bisnis juga harus senantiasa *istiqamah*. Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan.⁴¹

2.1.1.1 Definisi Manajemen Laba

1. Menurut Davidson, Stickney, dan Weil (1987)

Earnings management is the process of taking deliberate steps within the constraints of generally accepted accounting principles to bring about desired level of reporting earnings.

2. Menurut Schipper (1989)

Earnings management is a purposes intervention in the external financial reporting process, with the intent of obtaining some

⁴¹ Ahmad Yusuf Marzuqi dan Achmad Badarudin Latif, “Manajemen Laba dalam Etika Bisnis Islam,” *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 7, no. 1 (2010): 17.

private gain (as opposed to say, merely facilitating the neutral operation of the process).

3. Menurut *National Association of Certified Fraud Examiners* (1993)

Earnings management is the intentional, deliberate, misstatement or omission of material facts, or accounting data, which is misleading and, when considered with all the information made available, would cause the reader to change or alter his or judgement or decision.

4. Menurut Healey dan Wahlen (1999)

Earnings management occurs when managers uses judgment in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about underlying economics performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on the reported accounting numbers.

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi manajemen laba yaitu aktivitas manajerial untuk “mempengaruhi” dan mengintervensi laporan keuangan.⁴²

2.1.2.2 Motivasi Manajemen Laba

Scott menyatakan bahwa terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajer melakukan manajemen laba, diantaranya :

1. Pemberian Informasi kepada Investor

Manajemen melakukan manajemen laba agar laporan keuangan perusahaan terlihat lebih baik. Hal ini dikarenakan kecenderungan investor melihat laporan keuangan untuk menilai suatu perusahaan. Investor umumnya lebih tertarik pada kinerja keuangan perusahaan di masa datang dan menggunakan laba yang dilaporkan pada saat ini untuk meninjau kembali kemungkinan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

⁴² Sulistiyanto, *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*.48-51

2. Motivasi Pergantian CEO

Motivasi manajemen laba juga terjadi pada sekitar waktu pergantian CEO. CEO yang akan diganti melakukan pendekatan strategi dengan cara memaksimalkan laba dalam laporan keuangan dengan tujuan agar kinerjanya dinilai baik oleh para *stakeholder*.⁴³

3. *Initial Public Offerings* (IPO)

Dalam hubungan positif antara informasi dan harga saham perusahaan, menyatakan bahwa semakin bagus informasi yang dipublikasikan perusahaan, maka semakin bagus pula harga saham perusahaan tersebut, dan sebaliknya. Oleh sebab itu, perusahaan cenderung menginformasikan hal-hal yang positif agar investor merespon dengan positif atas saham yang ditawarkan. Itulah sebabnya manajer melakukan manajemen laba pada saat penawaran saham perdana (IPO). Perusahaan akan melaporkan labanya lebih tinggi (*overstate*) dibandingkan laba yang sesungguhnya saat penawaran saham perdana.⁴⁴

4. Motivasi Bonus

Motivasi bonus merupakan dorongan bagi manajer dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba. Jika laba lebih rendah daripada target yang ditetapkan maka dapat mendorong manajemen untuk mentransfer laba masa depan menjadi laba saat ini dengan harapan akan memperoleh bonus.⁴⁵ Sehingga, sumber daya

⁴³ Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih, "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Nonmanufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *MODUS* 26, no. 1 (2014): 33–50, <https://doi.org/10.24002/modus.v26il.576>.

⁴⁴ Aditama dan Purwaningsih.72

⁴⁵ Aditama dan Purwaningsih.88

perusahaan dialokasikan secara tidak tepat atau dengan kata lain pemilik harus memberi bonus kepada manajer yang sebenarnya belum tentu berhak menerima bonus. Dalam jangka panjang, situasi tersebut dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

5. Motivasi Pelanggaran Perjanjian Hutang

Pelanggaran perjanjian hutang membuktikan adanya penggunaan akrual dengan menaikkan laba dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang melanggar perjanjian. Perjanjian hutang berpengaruh terhadap pilihan metode akuntansi pada tahun pelaporan dan tahun terjadinya pelanggaran. Perusahaan yang dinyatakan melanggar perjanjian hutang secara signifikan akan menaikkan laba, dan *rasio debt to equity* dan *interest coverage* pada level yang telah ditentukan.

6. Motivasi Pajak

Manajer akan cenderung berupaya untuk meminimalisir seluruh kewajiban, termasuk kewajiban membayar pajak. Sehingga laba dalam laporan keuangan akan ditampilkan lebih rendah dari yang sesungguhnya dengan tujuan agar pajak yang dibayar juga rendah.

7. Motivasi Politik

Motivasi dengan dasar politik didasari oleh banyak alasan, misalnya persyaratan yang disyaratkan oleh pemerintah terkait syarat kecukupan modal pada bidang perbankan dan asuransi. Selain itu aktivitas rekayasa manajerial ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur laba saat dijatuhi denda oleh pemerintah, putusan pengadilan terkait penetapan penalti. Agar denda yang dibayar sedikit, maka perusahaan akan mengatur nilai perusahaan dan nilai labanya menjadi lebih kecil apabila

denda dihitung berdasar nilai perusahaan atau laba yang diperoleh perusahaan.⁴⁶

2.1.2.3 Bentuk-Bentuk Manajemen Laba

Scott (1997) merangkum bentuk umum yang digunakan dalam praktik manajemen laba, yaitu:

1. *Taking a Bath*

Pola ini terjadi selama periode pada saat terjadinya reorganisasi seperti adanya pergantian CEO baru. Jika manajer merasa harus melaporkan kerugian maka ia akan melaporkan dalam jumlah yang besar. Dengan tindakan ini, manajer berharap dapat meningkatkan laba yang akan datang dan kesalahan atas kerugian perusahaan dapat dilimpahkan kepada manajer lama.

2. *Income Minimization*

Perusahaan akan meminimumkan laba pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapatkan perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebanan pengeluaran iklan serta riset dan pengembangan yang cepat.

3. *Income Maximization*

Manajer kemungkinan memaksimumkan laba bersih yang dilaporkan untuk tujuan bonus. Perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian utang mungkin juga akan memaksimumkan pendapatan dengan tujuan agar kreditur masih memberikan kepercayaan pada perusahaan tersebut.

4. *Income Smoothing*

⁴⁶ Aditama dan Purwaningsih.99-100

Income smoothing merupakan sarana yang digunakan manajemen untuk mengurangi variabilitas urutan-urutan pelaporan penghasilan relatif terhadap beberapa urutan-urutan target yang terlibat karena adanya manipulasi variabel-variabel transaksi riil.⁴⁷

2.1.2.4 Pengukuran Manajemen Laba

Secara umum, terdapat tiga pendekatan untuk mendeteksi manajemen laba, antara lain:

1. Model Berbasis *Aggregate Accrual*

Model ini merupakan model yang menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. model-model ini menggunakan total akrual dan model regresi untuk menghitung akrual yang diharapkan dan akrual yang tidak diharapkan. Adapun model-model yang dimaksud yaitu:

a. Model Healy

Model Healy (1985) merupakan model yang menggunakan total akrual sebagai proksi manajemen laba. Nilai total akrual diperoleh dari nilai *net income* dikurangi arus kas dari aktivitas operasi. Kelemahan metode ini yaitu dalam menghitung total akrual yang digunakan sebagai proksi manajemen laba mengandung *nondiscretionary accruals*, atau dengan kata lain model ini mengarah pada uji yang salah spesifikasi.

b. Model DeAngelo

Model DeAngelo (1986) juga menggunakan total akrual sebagai selisih antara laba yang diperoleh

⁴⁷ Annisa Metta.C.W, “Analisis Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009,” *Skripsi Sarjana Studi Manajemen* (Universitas Diponegoro, 2010).16

dengan arus kas pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila *nondiscretionary accruals* berubah dari periode ke periode maka baik model Healy dan DeAngelo akan mengukur *discretionary accruals* dengan kesalahan.

c. Model Jones

Model Jones (1991) tidak menggunakan asumsi bahwa *nondiscretionary accruals* konstan. Dalam menghitung total akrual, model ini menghubungkan antara total akrual dengan perubahan penjualan dan aktiva tetap. Model Jones secara implisit mengasumsikan pendapatan merupakan *nondiscretionary*. Sehingga kelemahannya jika laba dikelola menggunakan *discretionary* maka akan menghapus bagian laba yang dikelola untuk proksi *discretionary accruals*.

d. Model Jones modifikasi

Model ini merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan menggunakan perkiraan yang salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accruals*. Model ini menggunakan sisa regresi total akrual dari perubahan penjualan dan aktiva tetap, dimana pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang yang terjadi.

2. Model Berbasis *Specific Accruals*

Model ini menggunakan pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan komponen dalam laporan keuangan tertentu dari industri tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industri asuransi.

3. Model Berbasis *Distribution of Earnings After Management*

Model ini dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor yang mempengaruhi pergerakan laba. Model ini fokus pada pergerakan laba di sekitar *benchmark* yang dipakai, misalnya laba kuartal sebelumnya untuk menguji apakah *incidence* jumlah yang berada diatas maupun dibawah *benchmark* didistribusikan secara merata, atau merefleksikan ketidakberlanjutan kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat.

Dari berbagai model diatas, hanya model berbasis akrual yang memberikan hasil cukup kuat dalam mendeteksi keberadaan manajemen laba. Alasannya model manajemen laba berbasis *aggregate accruals* sejalan dengan akuntansi berbasis akrual yang banyak digunakan di banyak negara, dan menggunakan seluruh komponen laporan keuangan. Selain itu *discretionary accruals* yang digunakan sebagai proksi manajemen laba merupakan selisih antara total akrual dengan *nondiscretionary accruals*, yaitu komponen utama laba dalam akuntansi berbasis akrual. Model Jones modifikasi dipilih dalam penelitian ini karena dinilai sebagai model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dan memberikan hasil yang paling *robust*. Selain itu kelebihan model ini adalah memecah total akrual menjadi empat komponen utama akrual yaitu sehingga memberikan hasil yang cukup kuat dalam mendeteksi komponen-komponen manajemen laba.⁴⁸

2.1.3 *Good Corporate Governance*

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik dikenal dengan *good corporate governance*. *Good corporate*

⁴⁸ Sulistiyanto, *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*.211-225

governance merupakan konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh dan menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan seluruh informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu, dan transparan. Dengan demikian, semua perusahaan publik maupun swasta harus memandang *good corporate governance* bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan.⁴⁹

Dalam perspektif Islam, tidak terdapat rumusan baku terkait hal ini. Namun, dari berbagai pernyataan yang terdapat dalam ayat Al-Quran maka dapat dikonstruksikan *good corporate governance* dalam perspektif syariah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yaitu:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ

Artinya: “*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) yang menjadikan kamu supaya memakmurkannya (membangunnya).*” (QS. Hud:61)

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: “*(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*” (QS. al-Hajj: 41).

Berdasarkan kedua ayat diatas, ayat pertama menjelaskan bahwa misi utama manusia adalah membangun bumi. Sedangkan dalam Surah al-Hajj ayat 41 menegaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan shalat, membayar zakat dan menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Sehingga, dapat dirumuskan bahwa *good corporate governance* dalam perspektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk

⁴⁹ Nila Umailatul Fitri, “Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu,” *Skripsi Sarjana Studi Perbankan Syariah* (UIN Raden Intan Lampung, 2018).30

mengelola pembangunan yang berorientasi pada: 1). Penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniah sebagaimana disimbolkan penegakan shalat, 2). Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan yang disimbolkan melalui zakat, dan 3). Penciptaan stabilitas politik diilhami dari *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*.⁵⁰

Melalui penerapan *good corporate governance* merupakan usaha untuk berbuat *ma'ruf* dan mencegah dari perbuatan yang *mungkar*, untuk kemudian kita kembalikan urusan kita kepada Allah SWT sebab hanya kepada Allah-lah segala urusan kembali, dan Dia mengaturnya sesuai dengan kehendak-Nya. Sebuah struktur perusahaan yang memungkinkan dalam menjalankan tata kelola perusahaan melalui operasional yang patuh terhadap ketentuan syariah merupakan hal yang penting.

Terdapat beberapa prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya *good corporate governance*, yaitu prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut merupakan bagian dari sistem syariah. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain:

- a. *Shidiq*, memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.
- b. *Tabligh*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan melayani masyarakat. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat dan melayani kebutuhan masyarakat pengguna produk atau jasa perusahaan dengan baik.
- c. *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari investor, sehingga timbul

⁵⁰ Joko Setyono, "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)," *Jurnal Muqtasid* 6, no. 1 (2015): 40.

rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi.

- d. *Fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan.⁵¹

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menerbitkan beberapa prinsip mendasar tentang *corporate governance* dan telah merevisinya pada tahun 2004. Tambahan dalam pedoman baru EOOD tersebut yaitu adanya penegasan tentang perlunya menciptakan kondisi oleh pemerintah dan masyarakat untuk dapat dilaksanakannya *good corporate governance* secara efektif.

Pemerintah Indonesia semakin menyadari perlunya penerapan *good governance* di sektor publik. Pada November 2004, Pemerintah melalui Keputusan Menko Bidang Perekonomian No. KEP/49/M.EKON/11/2004 telah menyetujui pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Salah satu tugas penting dari Sub-Komite Korporasi adalah menciptakan pedoman *Good Corporate Governance* bagi dunia usaha dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan praktik *Good Corporate Governance* kepada pemangku kepentingan⁵²

2.1.3.1 Definisi *Good Corporate Governance*

Berikut ini adalah definisi *good corporate governance* dari beberapa sumber, antara lain:

⁵¹ Fitri, "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu."32-33

⁵² Sawutri.B Utami, *Materi Pokok Usaha-Usaha Milik Negara dan Daerah* (Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka, 2017).5.4

1. *Cadbury Committee* (1992) mendefinisikan *corporate governance* yaitu:

Sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

2. OECD mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

3. Menurut Keputusan Kementerian BUMN No. KEP-117/MBU/2002, *corporate governance* adalah:

Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

4. Menurut Price Waterhouse Coopers (2000):

Corporate governance terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola

risiko dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*.⁵³

2.1.3.2 Asas *Good Corporate Governance*

Perusahaan harus memastikan bahwa asas *good corporate governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Asas ini diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 pasal 3, asas *good corporate governance* antara lain:

1. Transparansi

Prinsip transparansi berarti bahwa para pengelola berkewajiban untuk menjalankan prinsip keterbukaan terkait proses pembuatan keputusan dan penyampaian informasi. Transparansi dalam menyampaikan informasi juga berarti bahwa informasi yang disampaikan harus tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya untuk menjaga objektivitasnya.⁵⁴ Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, serta hak-hak pribadi.

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Sehingga perusahaan

⁵³ Utami.5.5-5.6

⁵⁴ Sukrisno Agoes dan Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2014).104

harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Setiap bagian perusahaan dan seluruh karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan..

3. Responsibilitas

Bahwa organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan, serta melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan sehingga kesinambungan usaha dalam jangka panjang dapat terpelihara dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi

Bahwa untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.⁵⁵ Sehingga, para pengelola dalam suatu keadaan dalam melakukan pengambilan keputusan harus bersifat profesional, mandiri, dan bebas dari konflik kepentingan.⁵⁶

⁵⁵ Utami, *Materi Pokok Usaha-Usaha Milik Negara dan Daerah*.5.10-5.12

⁵⁶ Agoes dan Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*.105

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan prinsipal berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Oleh karena itu, beberapa hal pokok yang perlu dilaksanakan, yaitu:

- a. Memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan pendapat, dan membuka akses informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarier, dan melaksanakan tugasnya.⁵⁷

2.1.3.3 Organ *Good Corporate Governance*

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang mekanisme dari organ minimal yang harus ada dalam perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Namun, dalam praktiknya diperlukan organ tambahan guna menjamin terselenggaranya *good corporate governance*. Organ tambahan untuk melengkapi penerapan *good corporate governance* antara lain:

1. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum maupun khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada dewan direksi.⁵⁸ Dewan komisaris menjadi mekanisme

⁵⁷ Utami.5.10-5.12

⁵⁸ Agoes dan Ardana. 108

pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Sedangkan ukuran dewan komisaris yang dimaksud ialah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.⁵⁹

2. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada manajer dengan efektif dan menambah nilai perusahaan. Terdapat tiga misi yang diemban oleh komisaris independen, yaitu mendorong terciptanya dan diterapkannya:

- a. Iklim yang objektif dan keadilan untuk semua pihak yang berkepentingan sebagai prinsip utama dalam pembuatan keputusan manajerial
- b. Prinsip dan praktek *good corporate governance* di Indonesia
- c. Prinsip *good corporate governance* melalui pemberdayaan dewan komisaris

Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab komisaris independen antara lain:

- a. Memiliki startegi bisnis yang efektif, termasuk memantau jadwal, anggaran dan efektivitas strategi bisnis tersebut
- b. Mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional

⁵⁹ Nurul Juita Thesarani, "Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit terhadap Struktur Modal," *Jurnal Nominal* 6, no. 2 (2017): 1–13.

- c. Memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik
- d. Mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai dalam perusahaan
- e. Mengidentifikasi dan mengelola risiko dan potensi krisis dengan baik
- f. Mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik.⁶⁰

3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Sehingga manajer berkedudukan sebagai pengelola perusahaan sekaligus sebagai pemilik perusahaan. Kepemilikan manajerial menjadi isu penting dalam teori keagenan yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri.⁶¹ Dengan demikian, kepemilikan manajerial dapat mengurangi *agency problem* antara pihak manajer dan pemegang saham melalui penyelerasan kepentingan antar pihak yang berbenturan kepentingan.⁶²

Pemahaman tentang kepemilikan perusahaan sangat penting karena berhubungan dengan pengendalian operasional perusahaan. Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen

⁶⁰ Sulistiyanto.145

⁶¹ Indah.R, Afrizal, dan Diah P.A, “Determinan Manajemen Laba pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”: 41

⁶² Kusmayadi, *Good Corporate Governance*.⁶³

laba menjadi sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan.⁶³

4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham oleh investor institusional dapat menjadi kendala perilaku oportunistik manajemen yang memanfaatkan manajemen laba untuk kepentingan pribadinya. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan saham oleh investor institusional maka proses *monitoring* akan berjalan lebih efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam hal manajemen laba yang dapat merugikan kepentingan pemilik.⁶⁴ Hal ini dikarenakan selain memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif, investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.⁶⁵

Bushee dalam Hayati dan Gusnardi (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens.⁶⁶ Dengan

⁶³ Indah.R, Afrizal, dan Diah P.A, “Determinan Manajemen Laba pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”: 41

⁶⁴ Ambarita dan Anita Nuswantara, “Pengaruh Penerapan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”48

⁶⁵ Indah.R, Afrizal, dan Diah P.A, “Determinan Manajemen Laba pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”40

⁶⁶ Fitri Hayati dan Gusnardi, “Pengaruh Penerapan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi pada BUMN di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2009).”374

demikian, kepemilikan institusional merupakan bagian dari mekanisme *good corporate governance*, karena fungsi *monitoring* yang diberikan oleh investor institusional dapat memastikan bahwa manajer akan bertindak yang terbaik bagi kepentingan pemilik.⁶⁷

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham institusional (perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan lain).⁶⁸ Kepemilikan institusional memiliki peran dalam pengambilan keputusan sebab pada umumnya jumlah kepemilikan institusional relatif besar sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Dengan demikian, pihak institusional yang memiliki proporsi saham pada suatu perusahaan akan meningkatkan sistem pengawasannya pada kinerja manajemen untuk meminimalisir tindakan-tindakan kecurangan dan manajemen laba yang mungkin dapat terjadi.⁶⁹

5. Komite Audit

Komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan dan efektivitas internal serta eksternal audit. Komite audit melakukan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dalam menciptakan keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap peraturan

⁶⁷ Ambarita dan Anita Nuswantara, "Pengaruh Penerapan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia."34

⁶⁸ Metta Kusumaningtyas dan Dessy Noor Farida, "Pengaruh Kompetensi Komite Audit, Aktivitas Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba," *Jurnal Akuntansi Indonesia* 4, no. 1 (2015): 66–82, <http://dx.doi.org/10.30659/jai.4.1.66-82>.

⁶⁹ Yogi dan Damayanthi, "Pengaruh Arus Kas Bebas, Capital Adequacy Ratio dan Good Corporate Governance pada Manajemen Laba."

perundang-undangan yang berlaku, dan pengawasan internal yang memadai. Adapun pengawasan yang harus dilakukan oleh komite audit antara lain pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan, manajemen risiko dan pengendalian, serta *corporate governance*.

Selain untuk menciptakan iklim disiplin dan kontrol dalam perusahaan, komite audit juga berfungsi untuk memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan terhadap adanya kontrol internal yang baik.⁷⁰

Penelitian ini menggunakan tiga organ tambahan dari penerapan *good corporate governance*, yaitu: dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit. Dewan komisaris independen diukur dengan membandingkan jumlah anggota dewan komisaris independen dengan seluruh anggota dewan komisaris, sedangkan kepemilikan institusional diukur dengan membandingkan jumlah saham kepemilikan institusional dengan seluruh jumlah saham yang beredar. Komite audit diukur melalui jumlah dari anggota komite audit dalam suatu perusahaan.

2.1.4 Free Cash Flow

Metode yang cukup canggih untuk memeriksa fleksibilitas keuangan perusahaan yaitu melalui pengembangan analisis arus kas bebas (*free cash flow*). Arus kas bebas (*free cash flow*) adalah jumlah arus kas diskresioner yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya, istilah *free cash flow* menunjukkan pada arus kas yang tersedia untuk didistribusikan kepada investor setelah perusahaan melakukan investasi pada tambahan aktiva tetap, peningkatan modal kerja yang diperlukan untuk

⁷⁰ Sulistiyanto, *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*.141-143

mempertahankan pertumbuhan perusahaan. Misalnya depresiasi dimaksudkan untuk mengganti aktiva tetap yang nantinya usang, dengan aktiva tetap baru. Tetapi jika perusahaan mengalami pertumbuhan, maka mungkin dana dari depresiasi saja tidak cukup untuk membeli tambahan aktiva tetap yang baru. Demikian juga apabila perusahaan mengalami pertumbuhan, maka modal kerja yang diperlukan akan menjadi lebih besar. Dengan demikian, dana yang diperoleh dari operasi akan dipakai sebagian untuk penambahan aktiva tetap serta modal kerja.

Apabila *free cash flow* dalam kondisi positif terus-menerus, maka NPV *free cash flow* akan semakin besar, nilai perusahaan juga semakin besar, dan semakin menarik perusahaan tersebut di mata prinsipal. Namun jika perusahaan mengalami *free cash flow* negatif tidak berarti perusahaan yang buruk, terkadang bagi perusahaan baru atau dalam masa pertumbuhan penjualan yang sangat tinggi, dana yang diperoleh dari hasil operasi tidak mencukupi untuk mendukung (pertumbuhan) operasi. Akibatnya, selama beberapa tahun perusahaan mungkin akan mengalami *free cash flow* negatif. Selama bersifat sementara (*temporary*) keadaan tersebut maka di masa yang akan datang diharapkan dapat memperoleh *free cash flow* positif sehingga nilai perusahaan juga akan positif.⁷¹

Dalam analisis *free cash flow*, pertama-tama ialah mengeluarkan pengeluaran modal, untuk menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan pengeluaran diskresioner terkecil yang umumnya dibuat oleh perusahaan. Semakin besar jumlah *free cash flow* maka semakin besar pula jumlah fleksibilitas keuangan perusahaan. *Free cash flow* dapat diukur melalui rumus menurut Kieso (2007) yaitu dengan menghitung selisih antara arus kas operasi dengan belanja modal.⁷²

⁷¹ Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018).67-69

⁷² Donald.E Kieso, Jerry.J Weygandt, dan Terry.D Warfield, *Akuntansi Intermediate, Terj.*, Jilid I (Jakarta: Erlangga, 2007).219

1. Arus Kas Operasi (*Operating Cash Flow / OCF*)

Arus kas operasi merupakan kas yang disediakan oleh aktivitas operasi yang berasal dari kelebihan penerimaan kas atas pengeluaran kas dari kegiatan operasi yang penentuannya melalui konversi dari dasar akrual menjadi dasar kas. OCF terdiri dari semua aktivitas utama perusahaan dalam memperoleh laba, sehingga penyusutan dan amortisasi tidak dimasukkan sebab bukan merupakan arus kas keluar.⁷³

2. Belanja Modal (*Capital Expenditure*)

Belanja modal yang dimaksud ialah modal kerja bersih yang besarnya diperoleh dari selisih biaya yang dikeluarkan untuk membelanjakan aset tetap dikurangi dengan kas yang diterima dari penjualan aset tetap.⁷⁴

Pengukuran *free cash flow* dalam penelitian ini dibagi dengan total aset pada periode yang sama agar dapat lebih *comparable* bagi perusahaan sampel dan nilainya menjadi lebih relatif dengan ukuran perusahaan.

2.1.5 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak menjadi langkah awal dalam manajemen pajak. Perencanaan pajak merupakan sebuah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien.⁷⁵ Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh

⁷³ Stephen A Ross et al., *Fundamentals of Corporate Finance*, ed. oleh Catur Sasongko (Jakarta: Salemba Empat, 2015).36

⁷⁴ Ross et al.37

⁷⁵ Chairil A.Pohan, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).13

oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar wajib pajak dapat membayar dalam jumlah minimum.⁷⁶

Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Apabila fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya.⁷⁷ Cara untuk menekan jumlah beban pajaknya agar lebih efisien, antara lain:

1. *Tax avoidance* (penghindaran pajak)

Tax avoidance merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan.

2. *Tax evasion* (penyelundupan pajak)

Tax evasion merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman, serta bertentangan dengan ketentuan perpajakan, sebab metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan, sehingga berisiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal.

3. *Tax saving* (penghematan pajak)

Tax saving merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

⁷⁶ Pohan.16

⁷⁷ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).9

Secara umum, tujuan pokok dari perencanaan pajak yang baik yaitu:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, diantaranya:
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan administratif sehingga terhindar dari sanksi administratif dan pidana
 - b. Melaksanakan secara efektif seluruh ketentuan undang-undang perpajakan.⁷⁸

Motivasi perencanaan pajak antara lain:

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (*complexity of rule*)

Semakin rumit peraturan perpajakan, memunculkan semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.

2. Besarnya pajak yang dibayar (*tax required to pay*)

Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar, maka akan semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.

3. Biaya untuk negosiasi (*cost of bribe*)

Baik disengaja atau tidak, wajib pajak melakukan negosiasi dan memberi uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi uang sogokan yang

⁷⁸ Pohan, *Manajemen Perpajakan*.21

dibayarkan, maka semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. Risiko deteksi (*probability of detection*)

Semakin rendah risiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran.

5. Besarnya denda (*size of penalty*)

Semakin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan, dan sebaliknya.

6. Moral masyarakat

Moral masyarakat akan memberikan efek tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak.⁷⁹

Pengukuran perencanaan pajak dalam penelitian ini diukur melalui *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan. Ukuran efektivitas manajemen pajak sendiri yang dimaksud yaitu ukuran efektivitas dari *tax planning* (perencanaan pajak).⁸⁰ *Tax retention rate* diperoleh dengan membagi nilai laba bersih dengan laba sebelum pajak pada tahun berjalan.

⁷⁹ Pohan.19

⁸⁰ Aditama dan Purwaningsih, "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Nonmanufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia."

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Variabel | Hasil Penelitian |
|----|--|---|---|---|
| 1. | Annur Fitri Hayati, Gusnardi (2012) | Pengaruh Penerapan Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba (Studi pada BUMN di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2009) | Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional dan komisaris independen, berpengaruh terhadap manajemen laba. |
| 2. | Hikmah Is'ada Rahmawati (2013) | Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan | Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Independen, Kepemilikan Manajerial | Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba. Disisi lain komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. |
| 3. | Eny Kusumawati (2019) | Determinan Manajemen Laba : Kajian Empiris pada Perusahaan | <i>Leverage, Free Cash Flow,</i> Profitabilitas, Ukuran | Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>leverage, free cash flow,</i> profitabilitas, ukuran |

| | | | | |
|----|---------------------|---|--|---|
| | | Manufaktur Go Publik di Bursa Efek Indonesia | Perusahaan, Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit | perusahaan, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan perencanaan pajak, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. |
| 4. | Evi Octavia (2017) | Implikasi <i>Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba | Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Ukuran Perusahaan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. |
| 5. | Dian Agustia (2013) | Pengaruh <i>Free Cash Flow</i> dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba | <i>Free Cash Flow</i> , Kualitas Audit | Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>free cash flow</i> dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. |
| 6. | Bella | Analisis <i>Financial</i> | <i>Financial</i> | Hasil penelitian |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | Nabila Lukita Putri, Sistya Rachmawati (2018) | <i>Distress</i> dan <i>Free Cash Flow</i> dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi Terhadap Manajemen Laba | <i>Distress, Free Cash Flow</i> , Dewan Komisaris Independen | menunjukkan bahwa <i>financial distress</i> berpengaruh positif terhadap manajemen laba. <i>Free cash flow</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dewan komisaris independen tidak dapat memperkuat pengaruh <i>financial distress</i> terhadap manajemen laba. Dewan komisaris independen memperkuat pengaruh <i>free cash flow</i> terhadap manajemen laba |
| 7. | Riska Nirwanan Sari, Arief Tri Hardiyanto, Patar Simamora (2018) | Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017 | Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, Profitabilitas | Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan, dan profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. |
| 8. | Eny Kusumawati, Shinta Permata Sari, Rina | Pengaruh Asimetri Informasi dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> | Praktik Manajemen Laba, Asimetri Informasi, Kepemilikan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan praktik manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar |

| | | | | |
|-----|---|---|---|--|
| | Trisnawati (2013) | Terhadap Praktik <i>Earnings Management</i> (Kajian Perbandingan Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks Syariah dan Indeks Konvensional Bursa Efek Indonesia) | Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komposisi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Keberadaan Komite Audit | dalam indeks syariah dan indeks konvensional. Asimetri informasi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris, dan keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. |
| 9. | Gunawan, Elona Meita Situmorang (2016) | Pengaruh Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajemen dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011-2015 | Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit | Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. |
| 10. | A.A Gede Raka Plasa Negara, I.D.G. Dharma Suputra | Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap | Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap |

| | | | | |
|-----|--|--|--|---|
| | (2017) | Manajemen Laba | | manajemen laba. |
| 11. | Randi Febrian, Tertiarito Wahyudi, Ahmad Subeki (2018) | Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia) | Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. |
| 12. | Sri Ayem, Putri Husna Nur Arifah (2019) | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konvergensi IFRS dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017) | Ukuran Perusahaan, Konvergensi IFRS, Perencanaan Pajak | Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, perencanaan pajak dan konvergensi IFRS secara simultan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan dan perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan konvergensi IFRS tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. |
| 13. | Vika Indah R, Afrizal, Enggar Diah P.A | Determinan Manajemen Laba pada Perusahaan BUMN yang | Ukuran Komite Audit, Proporsi Dewan Komisaris, | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ukuran komite audit, proporsi dewan komisaris, |

| | | | | |
|-----|---|--|--|---|
| | (2018) | Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016 | Kepemilikan Institusional, <i>Free Cash Flow</i> , Independensi Auditor, Kualitas Audit | kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan independensi auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan <i>free cash flow</i> dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. |
| 14. | Egbunike Amaechi Patrick, Ezelibe Chizoba Paulinus, Aroh Nkechi Nympha (2015) | <i>The Influence of Corporate Governance on Earnings Managemen Practices: A Study of Some Selected Quoted Companies in Nigeria</i> | <i>Board Size, Firm Size, Board Independence, Audit Committee Independence</i> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>board size, firm size, board independence</i> , dan <i>audit strength</i> berpengaruh terhadap manajemen laba. |
| 15. | Metta Kusumaningtyas, Dessy Noor Farida (2015) | Pengaruh Kompetensi Komite Audit, Aktivitas Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba | Variabel bebas: Komite audit, aktivitas komite audit, kepemilikan institusional Variabel kontrol: <i>leverage</i> , pertumbuhan perusahaan, | Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit, dan aktivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. <i>Leverage</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--|
| | | | umur perusahaan, ukuran perusahaan | positif dan signifikan terhadap manajemen laba. umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. |
|--|--|--|------------------------------------|--|

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

2.2 Rumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Hubungan antara Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang memiliki tugas mengawasi jalannya perusahaan dan bertindak sebagai wakil para pemegang saham. Dewan komisaris independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen sehingga dapat mempengaruhi kemungkinan berkurangnya penyimpangan penyajian laporan keuangan oleh manajer.

Hubungan antara dewan komisaris independen dengan manajemen laba dapat dijelaskan melalui teori agensi. Menurut teori agensi, ada tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu pada umumnya mementingkan diri sendiri, memiliki daya pikir yang terbatas tentang masa depan, dan berusaha menghindari risiko. Berdasarkan asumsi tersebut, maka manajer sebagai *agent* akan bertindak oportunistik demi kepentingan pribadi daripada melakukan demi kepentingan bersama dan memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak *principal*.

Keberadaan dewan komisaris independen sebagai salah satu bentuk perwujudan *good corporate governance* dapat mengurangi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak manajer (*agent*). Beberapa

penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang sama, antara lain penelitian Gunawan dan Situmorang (2016), Patrick, *et al.* (2015), Hayati dan Gusnardi (2012), Hikmah Is'ada Rahmawati (2013), dan Evi Octavia (2017). Sedangkan pada hasil penelitian Eny Kusumawati (2019) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan teori agensi dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H1: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

2.3.2 Pengaruh Hubungan antara Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan institusional merupakan jumlah proporsi kepemilikan atas saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan investasi, dan institusi lainnya. Investor institusional diasumsikan sebagai orang yang berpengalaman dan dapat melakukan analisa keuangan yang lebih baik sehingga dapat mengawasi dan mengurangi praktik manajemen laba pada perusahaan.

Menurut teori agensi, manajer sebagai pihak agen yang diberi mandat dan tanggung jawab oleh pihak prinsipal memiliki akses informasi yang lebih terkait perusahaan sehingga rawan dimanipulasi demi kepentingan agen sendiri. Dengan adanya investor institusional yang memiliki pengalaman yang lebih dan dapat melakukan analisis keuangan lebih baik maka akan menekan praktik manajemen laba dan kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak agen. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Hayati dan Gusnardi (2012), Kusumaningtyas dan Farida (2015), serta Evi Octavia (2017). Sedangkan pada penelitian lain diantaranya penelitian Indah, *et al.* (2018), Kusumawati, Sari, dan Trisnawati (2013), dan Eny Kusumawati (2019) menunjukkan hal yang berbeda. Berdasarkan

teori agensi dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

2.3.3 Pengaruh Hubungan antara Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Komite audit merupakan organ yang membantu dewan komisaris yang bertugas melakukan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dalam menciptakan keterbukaan dan pelaporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengawasan internal perusahaan.⁸¹ Apabila komite audit mampu menjalankan tugasnya dan mempertahankan independensinya, maka kualitas laporan keuangan dapat meningkat, dan mampu mengontrol serta mengawasi manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.

Menurut teori agensi, manajer sebagai pihak yang diberi mandat dan tanggung jawab dalam mengelola perusahaan tentunya dituntut oleh pihak prinsipal untuk meningkatkan kinerjanya agar mendapat kompensasi yang tinggi. Sehingga jika tidak ada pengawasan yang memadai maka akan rentan dipermainkan oleh agen seolah target tercapai. Dengan demikian sangat dibutuhkan adanya pihak yang diberi wewenang dan bertanggung jawab atas pengawasan proses penyusunan pelaporan keuangan dan mengamati sistem pengendalian internal, dimana selanjutnya tugas tersebut didelegasikan kepada komite audit. Komite audit yang dapat berfungsi secara efektif dapat menghambat peningkatan praktik manajemen laba di perusahaan.

Hasil penelitian Kusumaningtyas dan Farida (2015), Evi Octavia (2017), dan Eny Kusumawati (2019), menunjukkan bahwa

⁸¹ Sulistiyanto, *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*.141

komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan hasil penelitian Gunawan dan Situmorang (2016) dan Hikmah Is'ada Rahmawati (2013) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan teori agensi dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H3: Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.4 Pengaruh Hubungan antara *Free Cash Flow* terhadap Manajemen Laba

Free cash flow dalam hubungannya dengan manajemen laba dapat dijelaskan dalam teori agensi. Dalam teori agensi, salah satu penyebab permasalahan antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) adalah konflik kepentingan. Salah satu konflik kepentingan dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan arus kas bebas perusahaan.

Ketika *free cash flow* dalam posisi yang besar, manajemen dapat melaporkan laba yang lebih rendah. *Free cash flow* digunakan sebagai bagian dari investasi perusahaan atau bentuk-bentuk pendanaan lain yang dapat dilakukan manajemen.⁸² Perusahaan yang memiliki nilai *free cash flow* yang besar cenderung tidak melakukan praktik manajemen laba, sebab sebagian investor dalam perusahaan menanamkan dananya sementara akan lebih berfokus pada informasi jumlah arus kas bebas yang menunjukkan bagaimana perusahaan dalam membagikan dividen.⁸³ Namun, apabila tidak ada pengawasan yang efektif oleh pemegang saham yang disebabkan keterbatasan akses informasi, maka manajer dapat menyamarkan informasi atas tindakannya dengan melakukan manipulasi akuntansi.

⁸² Kusumawati, "Determinan Manajemen Laba: Kajian Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Go Publik Di Bursa Efek Indonesia."27

⁸³ Yogi dan Damayanthi, "Pengaruh Arus Kas Bebas, Capital Adequacy Ratio dan Good Corporate Governance pada Manajemen Laba."11

Hasil penelitian Dian Agustia (2013) menunjukkan bahwa *free cash flow* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini sejalan dengan penelitian Dian Agustia (2013), Indah, *et al.*(2018), Eny Kusumawati (2019) menunjukkan bahwa *free cash flow* berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan hasil penelitian Putri dan Rachmawati (2018) menunjukkan bahwa *free cash flow* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan teori agensi dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H4: Free cash flow berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.5 Pengaruh Hubungan antara Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Perencanaan pajak (*tax planing*) dalam hubungannya dengan manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Perencanaan pajak muncul karena terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Perbedaan kepentingan tersebut terletak pada perusahaan yang berusaha membayar pajak seminimal mungkin agar tidak mengurangi laba yang telah diperolehnya, sedangkan pemerintah mengandalkan pembayaran pajak untuk menandani pengeluaran negara. Sehingga, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar perusahaan melakukan manajemen laba. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba. Jika laba yang diperoleh tinggi, maka perusahaan cenderung melakukan manajemen laba dengan meminimalkan laba yang diperoleh agar beban pajaknya rendah.⁸⁴

Hasil penelitian Plasa Negara dan Saputra (2017), Febrian, *et al.* (2018), Ayem dan Arifah (2019) menunjukkan bahwa perencanaan

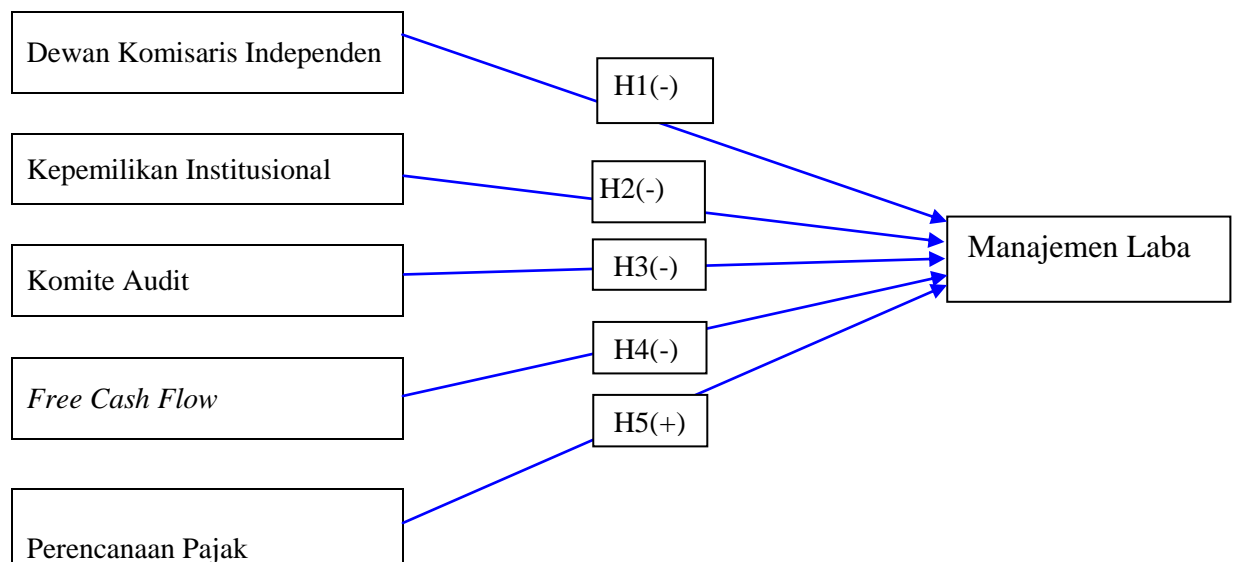
⁸⁴ Sri Ayem dan Putri Husna Nur Arifah, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konvergensi IFRS dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017),” *Jurnal Akuntansi dan Pajak Dewantara* 1, no. 2 (2019): 174, <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.912>.

pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan hasil penelitian Sari, *et al.*(2018), Eny Kusumawati (2019) menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H5: Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba

2.3 Model Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritik



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data adalah kombinasi dari berbagai jenis pengamatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang diperlukan untuk mengungkapkan permasalahan dan kemungkinan solusi dari masalah tersebut dengan menggunakan metode perhitungan yang tepat dalam sebuah penelitian.⁸⁵

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan berupa *annual report* dan laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya pada periode 2014-2018. Data diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI), www.idx.co.id dan situs lain yang mendukung penelitian termasuk *website* resmi masing-masing perusahaan BUMN yang dijadikan sampel. Adapun penjelasan tentang data yang diambil yaitu sebagai berikut:

1. Data yang digunakan untuk menghitung *discretionary accrual* yaitu laporan laba rugi (laba bersih perusahaan), laporan arus kas (arus kas bersih dari aktivitas operasi), neraca (total aktiva, perubahan pendapatan, piutang, dan total aktiva tetap).
2. Data-data yang digunakan untuk menghitung variabel independen antara lain:
 - a. Dewan komisaris independen, yaitu bagian dari dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen maupun pihak lain yang dapat mempengaruhi sikap independennya yang tercantum dalam laporan tahunan.

⁸⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).126

- b. Kepemilikan institusional, yaitu persentase saham yang dimiliki oleh investor konstitusional yang tercantum dalam laporan keuangan.
- c. Komite audit, yaitu informasi tentang struktur komite audit perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan.
- d. *Free cash flow*, yaitu berasal dari laporan arus kas tepatnya kas bersih dari aktivitas operasi yang dikurangkan dengan pengeluaran modal dan dividen.
- e. Perencanaan pajak, informasi tentang besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan baik laba bersih maupun laba sebelum pajak yang tercantum dalam laporan keuangan.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan kelompok manusia, kejadian (peristiwa), atau benda (sesuatu) yang menjadi minat peneliti untuk melakukan penelitian. Sehingga populasi merupakan sekelompok sesuatu yang menjadi minat peneliti, dimana dari kelompok tersebut dapat dilakukan generalisasi atas hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Untuk dapat dikatakan sebagai populasi, minimal suatu kelompok tersebut harus memiliki karakteristik yang membedakan dengan kelompok lainnya.⁸⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi, dengan kata lain sampel merupakan cerminan dari populasi.⁸⁷

⁸⁶ Nazir.¹²⁷

⁸⁷ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2009).¹¹

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan salah satu teknik *non-random sampling* dimana penentuan pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria-kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Adapun kriteria yang ditentukan antara lain:

1. Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian, yaitu periode 2014-2018.
2. Perusahaan yang memiliki data laporan keuangan yang lengkap selama periode penelitian untuk semua variabel yang diteliti, yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, *free cash flow*, dan perencanaan pajak.
3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangannya menggunakan mata uang Rupiah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

3.3.1 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data secara tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan kepada dokumen-dokumen tertentu.⁸⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah laporan keuangan yang diakses

⁸⁸ Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017).301

melalui situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, dan dari *website* resmi perusahaan BUMN yang digunakan dalam penelitian.

3.3.2 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang digunakan dalam rangka mengumpulkan segala informasi dan data yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, jurnal penelitian, skripsi, dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dalam penelitian.

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

3.4.1 Variabel Dependen

Definisi variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas). Dinamakan variabel dependen atau terikat karena kondisi atau variasinya terikat atau dipengaruhi oleh variasi variabel independen.⁸⁹ Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba (*earnings management*). Manajemen laba adalah aktivitas manajerial untuk “mempengaruhi” dan mengintervensi laporan keuangan. Manajemen laba sebagai variabel dependen diproksikan dengan *discretionary accruals* dan dihitung dengan model *Jones* yang dimodifikasi.

Discretionary accrual dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Nilai *Total Accrual* (TAC) yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary Least Square*) sebagai berikut:

$$TA_{it}/A_{it-1} = \beta_1 (1/A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta Rev_{it}/A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) +$$

⁸⁹ Echdar.217

Menggunakan koefisien regresi tersebut, maka nilai *non discretionary accruals* (NDA) dapat dihitung dengan rumus:

$$NDA_{it} = \beta_1 (1/A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta Rev_{it}/A_{it-1} - \Delta Rect_{it}/A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it}/A_{it-1})$$

Selanjutnya *Discretionary Accruals* (DA) dapat dihitung sebagai berikut:

Keterangan $DA_{it} = TA_{it}/A_{it-1} - NDA_{it}$:

DA_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

NDA_{it} = *Non Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

TA_{it} = Total Akrual perusahaan i pada periode ke t

NI_{it} = Laba bersih perusahaan i pada periode ke t

CFO_{it} = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t

A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1

ΔRev_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t

PPE_{it} = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t

$\Delta Rect_{it}$ = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t

e = *error*

3.4.2 Variabel Independen

Pengertian variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya perubahan pada variabel lain sehingga perubahan pada suatu variabel diasumsikan akan menyebabkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya.⁹⁰ Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* yang terdiri dari dewan komisaris independen, kepemilikan

⁹⁰ Echdar.217

institusional, serta komite audit. Sedangkan variabel independen lainnya yaitu *free cash flow* dan perencanaan pajak.

1. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan anggota atau bagian dari dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan pihak manajemen, anggota dewan komisaris lain, pemegang saham pengendali, dan bebas dari segala bentuk hubungan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.⁹¹ Dewan komisaris independen diukur dengan menghitung dengan rumus:

$$DKI = \frac{\text{jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional ialah jumlah proporsi kepemilikan atas saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga non-bank seperti perusahaan investasi dan institusi lain. Institusi yang memiliki saham pada perusahaan memiliki kesempatan dan kemampuan untuk memonitor dan mengendalikan manajer agar lebih fokus terhadap kinerja dan nilai perusahaan sehingga mampu meminimalisir manajemen laba yang dilakukan manajer terhadap perusahaan. Kepemilikan institusional pada penelitian ini diukur dengan rumus :

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki investor institusional}}{\text{Jumlah seluruh saham yang beredar}} \times 100\%$$

⁹¹ Okky Widya Arintasari dan Abdul Rohman, "Pengaruh Diversifikasi Industri, Geografis, dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba," *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 3 (2015): 1–13.

3. Komite Audit

Komite audit merupakan pihak yang bertugas dalam melakukan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dalam menciptakan keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas. Menurut Peraturan OJK Pasal 4 Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri 3(tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar emiten.⁹² Komite audit diukur dengan menggunakan jumlah anggota komite audit yang ada di perusahaan.

4. *Free Cash Flow*

Menurut Jensen, *free cash flow* merupakan aliran kas sisa dari pendanaan seluruh proyek yang menghasilkan *net present value* (NPV) positif yang didiskontokan pada tingkat biaya modal yang relevan. *Free cash flow*(FCF) diukur dengan mengurangi arus kas dari aktivitas operasi dikurangi investasi dibagi dengan total hutang.⁹³ Rumus perhitungan *free cash flow* dalam penelitian ini dibagi dengan total aset pada periode yang sama agar dapat lebih *comparable* bagi perusahaan sampel dan nilainya menjadi lebih relatif dengan ukuran perusahaan. Sehingga menurut Rosdini (2009) dalam Yogi dan Damayanthi (2016) *free cash flow* dihitung dengan rumus:

$$FCF = \frac{\text{Operating Cash Flow} - \text{Capital Expenditure}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

⁹² Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK Pasal 4 Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015, 3

⁹³ Jensen, "Agency Costs of Free Cash Flow , Corporate Finance , and Takeovers."323

Keterangan:

Operating Cash Flow = Arus kas operasi perusahaan pada tahun t

Capital Expenditure = Belanja modal perusahaan i pada tahun t

Total Assets = Total aset perusahaan i pada tahun t

5. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian dari manajemen pajak dan merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan. Perencanaan pajak dalam penelitian ini menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak)⁹⁴ yaitu:

$$\text{Tax Retention Rate} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Pretax Income (EBIT)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Tax Retention Rate = Tingkat retensi pajak pada tahun t

Net Income = Laba bersih perusahaan i pada tahun t

Pretax Income = Laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi linier berganda. Regresi linier merupakan metode statistika yang digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh dan memprediksikan seberapa

⁹⁴ Aditama dan Purwaningsih, "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Nonmanufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia."40

besar pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Analisis regresi linier berganda merupakan analisis regresi dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah dan kemudian menyajikan data observasi dalam bentuk gambar, ukuran dan dalam bentuk yang lain agar pihak lain dapat dengan mudah memahami karakteristik data observasi tersebut. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran deskriptif dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu nilai mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi masing-masing variabel independen dan dependen.⁹⁵ Pengukuran statistik deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program IBM *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 23.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis linear berganda. Syarat yang harus dipenuhi diantaranya data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel independen dan dependen dalam regresi telah terdistribusi secara normal. Model regresi yang baik ialah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal.⁹⁶ Untuk melakukan uji normalitas, maka penelitian ini

⁹⁵ Fitri Hayati dan Gusnardi, "Pengaruh Penerapan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi pada BUMN di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2009)."370

⁹⁶ Romie Priyastama, *Buku Sakti Kuasai SPSS* (Yogyakarta: Start Up, 2017).117

menggunakan analisis statistik tepatnya uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai probabilitas atau $p\text{-value} > \alpha$ (tingkat signifikansi) maka berarti data Y berdistribusi normal. Selain menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, pengujian normalitas dalam penelitian ini juga dengan melihat penyebaran data pada garis diagonal pada grafik normal *probability* serta grafik histogram.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik merupakan model regresi yang seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen, agar koefisien regresi linier dapat diestimasi dengan tepat. Asumsi multikolinieritas ini dapat ditentukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai VIF antar variabel independen kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.⁹⁷

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian yang bertujuan untuk melihat tidaknya korelasi antar residual pengganggu. Autokorelasi biasanya terjadi pada data *time series*, yaitu adanya korelasi antar residual pengganggu periode t dengan periode $t-1$ (periode sebelumnya). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dengan melihat nilai Durbin Watson pada tabel Model Summary. Bila nilai Durbin Watson mendekati 2 (disekitar 2) maka asumsi ini terpenuhi.

⁹⁷ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM 23* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013).103

Selain melalui uji Durbin Watson, pengujian autokorelasi juga dapat dilakukan dengan uji *run test*. Uji *run test* digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi, dimana pengambilan keputusan dengan melihat nilai Asymp. Sig (2-tailed) pada tabel *output* uji *run test*. Jika nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.⁹⁸

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat diuji dengan uji Glejser, yaitu dengan cara menyusun regresi antara nilai *absolute* residual dengan variabel independen. Jika masing-masing variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual ($\alpha=0.05$), maka dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.⁹⁹

3.5.3 Model Agresi Linier Berganda

Setelah menguji asumsi-asumsi regresi linier untuk melakukan metode analisis regresi linier berganda, maka langkah selanjutnya

⁹⁸ Ghozali.107

⁹⁹ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).135

menentukan model persamaan regresi. Model persamaan analisis regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu:

$$DA = \alpha + \beta_1 DKI_{it} + \beta_2 KI_{it} + \beta_3 KA_{it} + \beta_4 FCF_{it} + \beta_5 PP_{it} + e$$

Keterangan:

DA = *discretionary accrual* (proksi dari manajemen laba)

α = konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = koefisien regresi

DKI_{it} = persentase dewan komisaris independen pada perusahaan i pada periode t

KI_{it} = persentase kepemilikan institusional pada perusahaan i pada periode t

KA_{it} = persentase komite audit pada perusahaan i pada periode t

FCF_{it} = persentase *free cash flow* pada perusahaan i pada periode t

PP_{it} = persentase perencanaan pajak pada perusahaan i pada periode t

e = koefisien error

3.5.4 Uji Hipotesis

Dugaan model yang didapat akan diuji dengan pengujian model dan parameter sebagai berikut.

3.5.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t disebut juga sebagai uji parsial, yaitu untuk menguji apakah suatu variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat tabel Coefficients pada output SPSS. Jika nilai signifikansi t atau p-value lebih kecil dari 0,05 (α) atau nilai t_{hitung} lebih besar

dari t_{tabel} maka terdapat pengaruh yang kuat antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.4.2 Pengukuran Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (y). Nilai koefisien determinasi antara nol atau satu, dimana semakin kecil nilai R^2 maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen juga semakin terbatas. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati satu, maka variabel-variabel independen memberikan hampir keseluruhan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan *website* masing-masing perusahaan yang dijadikan sampel. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh perusahaan milik BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018 yang berjumlah sebanyak 20 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini pemilihannya dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada bab 3, berikut data pemilihan populasi dan sampel yaitu:

Tabel 4.1
Sampel Penelitian

| Keterangan | Jumlah |
|---|-----------|
| Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 | 20 |
| Perusahaan yang tidak sesuai dan tidak memiliki seluruh data yang terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian | (4) |
| Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan berturut-urut dalam satuan mata uang rupiah | (3) |
| Perusahaan yang terpilih menjadi sampel | 13 |
| Periode 2014-2018 (5 tahun) = dikali 5 | 65 |
| Sampel yang <i>outlier</i> | (28) |
| Jumlah sampel dalam penelitian | 37 |

Sampel sebanyak 37 buah tersebut kemudian akan diuji apakah terdapat pengaruh dari dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, *free cash flow*, dan perencanaan terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang menggunakan gambaran atau deskripsi suatu data dengan melihat nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi dan lain sebagainya.¹⁰⁰ Gambaran mengenai data tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-------------------------------|----|---------|---------|----------|-------------------|
| Dewan Komisaris Independen | 37 | ,20000 | ,50000 | ,3505768 | ,05677182 |
| Kepemilikan Institusional | 37 | ,79673 | ,99984 | ,9252768 | ,06441531 |
| Komite Audit | 37 | 2,00 | 5,00 | 3,6216 | ,63907 |
| Free Cash Flow | 37 | -,10737 | ,23165 | ,0590414 | ,07420072 |
| Perencanaan Pajak | 37 | ,51436 | ,99311 | ,7442368 | ,13916916 |
| Discretionary Accruals | 37 | -,00428 | ,01326 | ,0043876 | ,00398378 |
| Valid N (listwise) | 37 | | | | |

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel *discretionary accruals* (Y) memiliki nilai minimum -0,00428 terdapat

¹⁰⁰ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM 23.19*

dalam perusahaan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (2015) dan nilai maksimum sebesar 0,01326 terdapat dalam perusahaan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (2016), sedangkan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 0,0043876. Variabel dewan komisaris independen (X1) memiliki nilai minimum 0,2 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2016) , sedangkan nilai maksimum 0,5 terdapat dalam perusahaan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (2015) dan PT Timah (Persero) Tbk (2016), sedangkan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 0,3505768. Variabel kepemilikan institusional (X2) memiliki nilai minimum 0,79673 terdapat dalam perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2015) dan nilai maksimum 0,99984 pada perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2014 dan 2015), sedangkan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 0,9252768.

Variabel komite audit (X3) memiliki nilai minimum sebesar 2 dalam perusahaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2014) dan nilai maksimum sebesar 5 terdapat dalam perusahaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2017) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2018) sedangkan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,6216. Variabel *free cash flow* (X4) memiliki nilai minimum -0,10737 pada perusahaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2017) dan nilai maksimum pada perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2016) sebesar 0,23165, sedangkan rata-ratanya yaitu 0,0590414. Variabel perencanaan pajak (X5) memiliki nilai minimum 0,51436 pada perusahaan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (2016) dan nilai maksimum 0,99311 pada perusahaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2018), sedangkan rata-ratanya yaitu 0,7442368.

4.1.3 Analisis Data

4.1.3.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi layak digunakan atau tidak dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik bertujuan untuk menghindari bias dalam analisis

data dan kesalahan spesifikasi model regresi yang digunakan. Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.¹⁰¹

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal.¹⁰² Adapun hasil pengujian uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov serta dengan melihat grafik histogram dan *normal probability*. Hasil pengujian asumsi normalitas antara lain yaitu:

Tabel 4.3

**Hasil Uji Normalitas: Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 37 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | ,00347740 |
| | | |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,065 |
| | Positive | ,065 |
| | Negative | -,064 |
| Test Statistic | | ,065 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} |

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Uji statistika Komlrogov-Smirnov adalaah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi dengan distribusi tertentu tersebut apakah telah

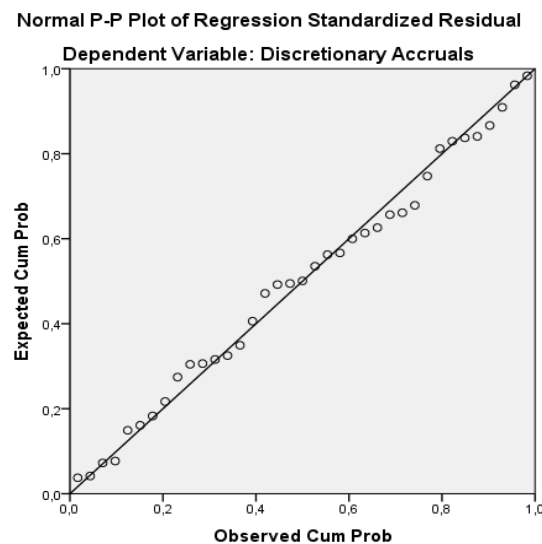
¹⁰¹ Hengky Latan dan Selva Temalagi, *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013).56

¹⁰² Singgih Santoso, *Mahir Statistik Multivariant dengan SPSS* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018).49

berdistribusi normal.¹⁰³ Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Sig. lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test diatas menunjukkan nilai sig. (Asymp. Sig.) sebesar 0,200 sehingga dapat disimpulkan data telah terdistribusi normal.

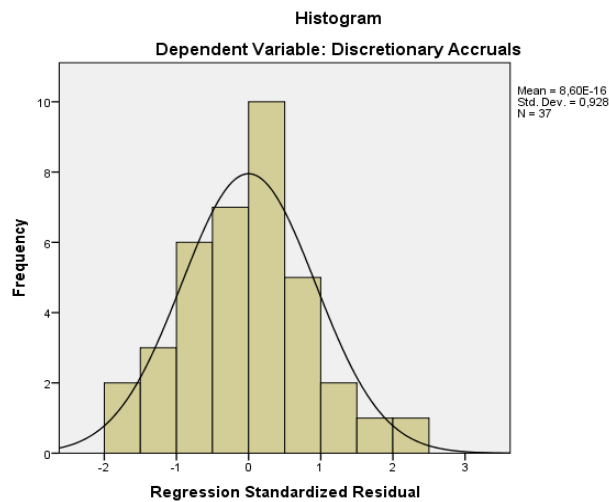
Selain menggunakan uji statistika Kolmoogorov-Smirnov, pengujian normalitas suatu data dapat pula melalui grafik plot *normal probability* serta melalui histogram. Data berdistribusi normal jika pada grafik plot Normal Q-Q terlihat titik-titik tersebar hanya pada sekitar garis diagonal dan tidak menjauh dari garis diagonal tersebut. Sedangkan apabila dilihat berdasarkan grafik histogram data dikatakan berdistribusi normal apabila membentuk lonceng yaitu tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan.

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas: *Normal Probability*



¹⁰³ Agus Widarjono, *Analisis Multivariant Terapan dengan Program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015).90

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas: Histogram



Berdasarkan kedua grafik diatas baik grafik *probability plot* menunjukkan titik-titik yang menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal dan searah mengikuti garis diagonal sehingga dapat disimpulkan melalui grafik *probability plot* bahwa residual data berdistribusi normal. Berdasarkan grafik histogram menunjukkan bahwa residual memiliki distribusi yang normal (tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal sehingga telah memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan untuk melakukan regresi dengan model linear berganda.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi atau hubungan antar variabel independen. Model regresi yang baik yaitu model regresi yang seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen, agar koefisien regresi linier dapat diestimasi dengan tepat.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | Coefficients ^a | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | -,010 | ,012 | | -,840 | ,407 | | |
| Dewan Komisaris | ,011 | ,011 | ,163 | ,997 | ,327 | ,921 | 1,086 |
| Independen | | | | | | | |
| Kepemilikan | ,015 | ,011 | ,244 | 1,375 | ,179 | ,780 | 1,282 |
| Institusional | | | | | | | |
| Komite Audit | -,001 | ,001 | -,218 | -1,250 | ,221 | ,806 | 1,241 |
| Free Cash Flow | -,021 | ,010 | -,400 | -2,162 | ,038 | ,718 | 1,393 |
| Perencanaan Pajak | ,004 | ,005 | ,139 | ,820 | ,418 | ,860 | 1,163 |

a. Dependent Variable: Discretionary Accruals

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas nilai *tolerance* semua variabel mendekati 1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk seluruh variabel independen tidak lebih dari 10. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa masing-masing variabel independen tidak terdapat gejala multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu atau residual pada periode saat ini (t) dengan periode sebelumnya (t-1). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama lain. Pengujian autokorelasi salah satunya dapat dilakukan melalui uji Durbin Watson (*DW test*). Adapun pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dalam uji Durbin Watson yaitu:

Tabel 4.5
Pengambilan keputusan dalam uji Durbin Watson

| Hipotesis nol | Keputusan | Jika |
|--|--------------------|-------------------------|
| Tidak ada autokorelasi positif | Tolak | $0 < d < dL$ |
| Tidak ada autokorelasi positif | <i>No decision</i> | $dL \leq d \leq Du$ |
| Tidak ada autokorelasi negatif | Tolak | $4-dL < d < 4$ |
| Tidak ada autokorelasi negatif | <i>No decision</i> | $4-dU \leq d \leq 4-dL$ |
| Tidak ada autokorelasi positif dan negatif | Terima | $dU < d < 4-dU$ |

Hasil pengujian autokorelasi melalui uji Durbin Watson dengan menggunakan regresi terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi: Uji Durbin Watson
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,488 ^a | ,238 | ,115 | ,00374735 | 1,710 |

a. Predictors: (Constant), Perencanaan Pajak, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Free Cash Flow

b. Dependent Variable: Discretionary Accruals

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil *output* SPSS diatas, diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,710 sedangkan nilai dL dan dU berurut-urut sebesar 1,3068 dan 1,6550 sehingga nilai pada tabel diatas terletak diantara nilai dL dan dU, dan nilai (4-dU) sebesar 2,345. Dengan demikian, dapat disimpulkan data model regresi ini tidak terjadi gejala autokorelasi, dan asumsi autokorelasi terpenuhi

Selain melalui Durbin Watson, pengujian autokorelasi dapat dilakukan melalui uji *run test*. Hasil pengujian autokorelasi melalui uji *run test* dengan menggunakan regresi terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Autokorelasi: Uji Run Test
Runs Test

| | Unstandardized Residual |
|-------------------------|-------------------------|
| Test Value ^a | ,00001 |
| Cases < Test Value | 18 |
| Cases >= Test Value | 19 |
| Total Cases | 37 |
| Number of Runs | 17 |
| Z | -,663 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | ,507 |

a. Median

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Dasar pengambilan uji *run test* yaitu apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih kecil (<) dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar (>) dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Berdasarkan tabel *output* SPSS, diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,507 > 0,05, sehingga model regresi bebas dari auto korelasi dan analisis regresi linier dapat dilanjutkan.

4. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas: Uji Glejser
Coefficients

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | ,003 | ,007 | | ,457 | ,651 |
| Dewan Komisaris Independen | ,002 | ,007 | ,064 | ,344 | ,733 |
| Kepemilikan Institusional | -,002 | ,007 | -,050 | -,249 | ,805 |
| Komite Audit | ,000 | ,001 | -,057 | -,288 | ,775 |
| Free Cash Flow | ,002 | ,006 | ,069 | ,328 | ,745 |
| Perencanaan Pajak | ,001 | ,003 | ,049 | ,255 | ,801 |

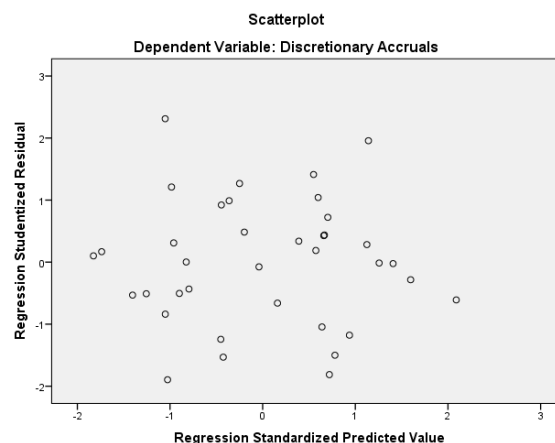
a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Tabel diatas merupakan hasil pengujian uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser. Berdasarkan hasil output diatas dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak mengandung heteroskedastisitas, artinya tidak terdapat korelasi antara besarnya data dengan residual sehingga jika data diperbesar tidak menyebabkan residual yang semakin besar pula. Sedangkan hasil uji melalui Scatterplot sebagai berikut:

Gambar 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas: Scatterplot



Berdasarkan grafik pada Scatterplot diatas tidak menunjukkan adanya pola tertentu dan terlihat titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah titik 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari asumsi heteroskedastisitas.

4.1.3.2 Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi

Tabel 4.9
Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square |
|-------|-------------------|----------|-------------------|
| 1 | ,488 ^a | ,238 | ,115 |

a. Predictors: (Constant), Perencanaan Pajak, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Free Cash Flow

b. Dependent Variable: Discretionary Accruals

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas nilai *adjusted R square* sebesar 11,5% atau 0,115. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 11,5%, sedangkan sisanya sebesar 88,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

2. Uji Statistik t

Tabel 4.10
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | -,010 | ,012 | | -,840 | ,407 |
| Dewan Komisaris Independen | ,011 | ,011 | ,163 | ,997 | ,327 |
| Kepemilikan Institusional | ,015 | ,011 | ,244 | 1,375 | ,179 |
| Komite Audit | -,001 | ,001 | -,218 | -1,250 | ,221 |
| Free Cash Flow | -,021 | ,010 | -,400 | -2,162 | ,038 |
| Perencanaan Pajak | ,004 | ,005 | ,139 | ,820 | ,418 |

a. Dependent Variable: Discretionary Accruals

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Uji t bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mekanisme *good corporate governance* yang terdiri dari dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit, serta variabel independen lainnya yaitu *free cash flow*, dan perencanaan pajak. Diketahui pula nilai t tabel sebesar 2,0395. Berdasarkan tabel output SPSS diatas maka pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Nilai signifikan Dewan Komisaris Independen (DKI) sebesar $0,327 > 0,05$ atau nilai t hitung sebesar $0,997 < 2,0395$. Dengan demikian H1 ditolak, artinya hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti dewan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi manajemen laba.
- b. Nilai signifikan kepemilikan institusional (KI) sebesar $0,179 > 0,05$ atau nilai t hitung sebesar $1,375 < 2,0395$ sehingga H2 ditolak. Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi manajemen laba.
- c. Nilai signifikan komite audit (KA) sebesar $0,221 > 0,05$ atau nilai t hitung $-1,250 < 2,0395$ sehingga H3 ditolak yang berarti bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Maka dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi manajemen laba.
- d. Nilai signifikan *free cash flow* (FCF) sebesar $0,038 < 0,05$ atau perbandingan nilai t hitung dan t tabel yaitu $-2,162 > -2,0395$ sehingga H4 diterima. Dengan demikian *free cash flow* berpengaruh signifikan terhadap manajemen

laba. Karena koefisien regresi pengaruh *free cash flow* terhadap manajemen laba bertanda negatif maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh keduanya berbanding terbalik, dimana semakin tinggi *free cash flow* maka semakin rendah pula praktik manajemen laba, dan sebaliknya jika nilai *free cash flow* semakin rendah maka semakin tinggi praktik manajemen laba.

- e. Nilai signifikan perencanaan pajak (PP) sebesar $0,418 > 0,05$ perbandingan nilai t hitung dan t tabel yaitu $0,820 > -2,0395$ sehingga artinya H_5 yaitu perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak tidak mempengaruhi manajemen laba.

4.1.3.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Uji analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, *free cash flow*, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba sebagai variabel dependen. Maka model persamaan regresi yang digunakan yaitu:

$$DA = \alpha + \beta_1 \text{DKI}_{it} + \beta_2 \text{KI}_{it} + \beta_3 \text{KA}_{it} + \beta_4 \text{FCF}_{it} + \beta_5 \text{PP}_{it} + e$$

Keterangan:

DA = *discretionary accrual* (proksi dari manajemen laba)

α = konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = koefisien regresi

DKI_{it} = persentase dewan komisaris independen pada perusahaan i pada periode t

KI_{it} = persentase kepemilikan institusional pada perusahaan i pada periode t

KA_{it} = persentase komite audit pada perusahaan i pada periode t

FCF_{it} = persentase *free cash flow* pada perusahaan i pada periode t

PP_{it} = persentase perencanaan pajak pada perusahaan i pada periode t

e = koefisien error

Adapun hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | -,010 | ,012 | | -,840 | ,407 |
| Dewan Komisaris Independen | ,011 | ,011 | ,163 | ,997 | ,327 |
| Kepemilikan Institusional | ,015 | ,011 | ,244 | 1,375 | ,179 |
| Komite Audit | -,001 | ,001 | -,218 | -1,250 | ,221 |
| Free Cash Flow | -,021 | ,010 | -,400 | -2,162 | ,038 |
| Perencanaan Pajak | ,004 | ,005 | ,139 | ,820 | ,418 |

a. Dependent Variable: Discretionary Accruals

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$DA = -0,010 + 0,011DKI + 0,015KI - 0,001KA - 0,021FCF + 0,004PP$$

Dari persamaan ini dapat dijelaskan:

- a. Persamaan regresi linier berganda menunjukkan nilai α sebesar -0,010 dan bernilai negatif. Berdasar nilai tersebut berarti bahwa apabila variabel independen yaitu dewan komisaris independen (DKI), kepemilikan institusional (KI), komite audit (KA), *free cash flow* (FCF), dan perencanaan pajak (PP) bernilai 0 atau konstan maka besarnya manajemen laba (DA) adalah -0,010.
- b. Koefisien regresi β_1 sebesar 0,011 berarti bahwa jika terjadi kenaikan dewan komisaris independen (DKI) sebesar satu satuan maka akan terjadi pula kenaikan manajemen laba (DA) sebesar 0,011.
- c. Koefisien regresi β_2 sebesar 0,015 yang berarti bahwa jika terjadi kenaikan kepemilikan institusional (KI) sebesar satu satuan maka akan terjadi pula kenaikan manajemen laba (DA) sebesar 0,015.
- d. Koefisien regresi β_3 sebesar -0,001 yang berarti jika terjadi penurunan komite audit (KA) sebesar satu satuan maka akan terjadi peningkatan manajemen laba (DA) sebesar 0,001.
- e. Koefisien regresi β_4 sebesar -0,021 yang berarti jika terjadi penurunan arus kas bebas (FCF) maka akan terjadi peningkatan manajemen laba (DA) sebesar 0,021.
- f. Koefisien regresi β_5 sebesar 0,004 yang berarti jika terjadi penurunan perencanaan pajak (PP) maka akan terjadi peningkatan manajemen laba (DA) sebesar 0,004.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba

Pengujian hipotesis pertama adalah apakah terdapat pengaruh negatif dewan komisaris independen terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa variabel dewan

komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 0,997 dan nilai signifikansi sebesar 0,327. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan H1 ditolak yang artinya besar ataupun kecilnya dewan komisaris independen tidak mempengaruhi manajemen laba secara signifikan pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

Dewan komisaris independen sebagai salah satu prinsip dalam penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat bertindak secara independen serta mengambil keputusan yang efektif, tepat, dan cepat sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan mandiri dan kritis agar dapat mengungkap praktik manajemen laba.¹⁰⁴ Menurut peraturan Pencatatan Efek No. 1-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang bersifat ekuitas di bursa, dewan komisaris terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris, salah satunya adalah komisaris independen, dan apabila dewan komisaris terdiri lebih dari 2 orang anggota dewan komisaris maka jumlah dewan komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Namun, terkadang ketentuan tersebut hanya dijadikan sebatas pemenuhan regulasi dalam penciptaan *good corporate governance* walaupun dalam praktiknya belum tentu ada jaminan demikian. Sehingga besar kecilnya anggota dewan komisaris independen tidak dapat mengurangi praktik manajemen laba.¹⁰⁵ Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Hikmah I. Rahmawati (2013), Gunawan dan Situmorang (2016), namun sejalan dan konsisten dengan hasil penelitian Indah, *et al.*(2018), dan Eny Kusumawati (2019) yang menyatakan bahwa dewan komisaris

¹⁰⁴ Muhammad Shidqon Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance* (Yogyakarta: UII Press, 2018).37

¹⁰⁵ Prabowo.46

independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini berarti semakin meningkatnya persentase dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba yang terjadi di perusahaan.

Dengan demikian, dewan komisaris independen tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen sehingga tidak dapat mengurangi manajemen laba. Artinya besar kecilnya dewan komisaris bukan menjadi faktor utama penentu efektivitas pengawasan terhadap manajemen laba. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris menimbulkan permasalahan agensi yaitu semakin banyaknya anggota dewan komisaris maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, misalnya berkomunikasi dan koordinasi kerja dari masing-masing anggota dewan, kesulitan mengawasi dan mengendalikan tindakan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan untuk perusahaan. Keadaan dewan komisaris yang kesulitan dalam menjalankan peran tersebut akan menyebabkan kurangnya pengawasan dari dewan komisaris terhadap manajemen perusahaan yang dapat berdampak pada penurunan kinerja perusahaan (Yermack, 1996) dan (Jensen, 1993).¹⁰⁶ Hal lain juga dapat disebabkan karena perubahan jumlah dan susunan dewan komisaris pada periode penelitian sebelumnya menyebabkan kinerja dewan komisaris periode penelitian belum efektif dalam menjalankan tugasnya dalam mengawasi dan monitoring praktik manajemen laba. Selain itu pada umumnya diketahui bahwa sebagian besar penunjukkan atau pengangkatan dewan komisaris independen berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dipilih oleh pemegang saham mayoritas, sehingga apabila terdapat keputusan yang tidak sejalan

¹⁰⁶ Indah.R, Afrizal, dan Diah P.A, "Determinan Manajemen Laba pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia."

dengan pemilik maka dapat dilakukan pergantian. Sehingga walau persentase dewan komisaris independen relatif besar namun tidak dapat benar-benar bertindak independen dan melakukan pengawasan.

4.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba

Pengujian hipotesis kedua adalah apakah terdapat pengaruh negatif dari kepemilikan institusional terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan dengan nilai *t* hitung sebesar 1,375 dan nilai signifikansi sebesar 0,179. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan H2 ditolak yang artinya besar ataupun kecilnya suatu kepemilikan institusional tidak mempengaruhi manajemen laba secara signifikan pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Hayati dan Gusnardi (2012), tetapi sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kusumawati, *et al.* (2013), Kusumaningtyas dan Farida (2015), Indah, *et al.* (2018), serta Eny Kusumawati (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional belum mampu mempengaruhi tindakan manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat menjalankan perannya secara efektif dalam mengurangi manajemen laba. Menurut Indah, *et al.* (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba diakibatkan karena kepemilikan institusional yaitu pihak dengan jumlah kepemilikan saham yang besar yang seharusnya diharapkan dapat mengendalikan agar manajemen laba, justru hanya berfokus pada

keuntungan yang dihasilkan sehingga para investor institusional memperoleh keuntungan yang tinggi.¹⁰⁷

Investor institusional sebagai pihak yang memegang kepemilikan saham yang besar seharusnya memiliki kekuatan lebih dalam mengendalikan manajemen untuk mencegah atau mengurangi praktik manajemen laba. Tetapi dalam hal ini, investor institusional tidak dapat mengendalikan manajemen perusahaan disebabkan investor institusional tidak berperan sebagai *sophisticated investors* yang memiliki lebih banyak kemampuan dan kesempatan memonitor dan mendisiplinkan manajemen agar lebih terfokus pada nilai perusahaan, serta membatasi kebijakan manajemen dalam melakukan manipulasi laba, melainkan hanya berperan sebagai pemilik sementara yang lebih terfokus pada *current earning*. Adanya investor sementara justru akan memotivasi manajer untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan pelaporan laba karena manajer merasa terikat untuk memenuhi target laba yang diinginkan oleh investor.¹⁰⁸

4.2.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Pengujian hipotesis ketiga adalah apakah terdapat pengaruh negatif dari komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar -1,250 dan nilai signifikansi sebesar 0,221. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan H3 ditolak yang artinya besar ataupun kecilnya komite audit di sebuah

¹⁰⁷ Indah.R, Afrizal, dan Diah P.A.

¹⁰⁸ Kusumawati, "Determinan Manajemen Laba: Kajian Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Go Publik Di Bursa Efek Indonesia."

perusahaan tidak mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hayati dan Gusnardi (2012), Kusumawati, *et al.* (2013), Gunawan dan Situmorang (2016) yang mengungkapkan bahwa komite audit belum mampu menjadi salah satu faktor yang mengurangi praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Kusumaningtyas dan Farida (2015), Evi Octavia (2017), Eny Kusumawati (2019) yang menyatakan terdapat pengaruh komite audit terhadap manajemen laba.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* belum mampu untuk mengendalikan praktik manajemen laba oleh pihak manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit belum menjalankan tugasnya, mengingat menurut Keputusan Menteri BUMN No.Kep-103/2002, tugas dan tanggung jawab komite audit diantaranya:

- a. Menilai pelaksanaan audit dan hasilnya
- b. Memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan
- c. Sistem pengendalian manajemen perusahaan dan pelaksanaannya
- d. Memastikan telah mendapat prosedur review yang memadai terhadap informasi yang dikeluarkan oleh BUMN
- e. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian komisaris dan dewan pengurus
- f. Melaksanakan tugas lain dalam lingkup tugas dan kewajiban komisaris.¹⁰⁹

Terlihat bahwa komite audit yang ada di perusahaan belum menjalankan tugas dengan semestinya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dengan menjunjung prinsip-prinsip dalam *corporate governance*. Hal ini kemungkinan karena penelitian hanya

¹⁰⁹ Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*.48

menghubungkan keberadaan komite audit, namun belum mencoba membuktikan pengaruh dari karakteristik anggota komite audit, dengan jenis manajemen laba. Karakteristik tersebut adalah aktivitas komite audit (jumlah pertemuannya dengan fungsi Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan auditor eksternal tanpa kehadiran Direksi), *financial literacy* anggota komite audit, kompetensi anggota komite audit, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan sebagainya.¹¹⁰ Dengan demikian hal ini dapat dijelaskan bahwa komite audit oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja, tetapi tidak dimaksud untuk menegakkan *good corporate governance* didalam perusahaan.¹¹¹

4.2.4 Pengaruh *Free Cash Flow* Terhadap Manajemen Laba

Pengujian hipotesis keempat adalah apakah terdapat pengaruh negatif dari kepemilikan institusional terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel *free cash flow* berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar -2,162 dan nilai signifikansi sebesar 0,038. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan H4 diterima yang artinya semakin meningkat nilai *free cash flow* (arus kas bebas) maka semakin menurun manajemen laba pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

¹¹⁰ Eny Kusumawati, Shinta Permata Sari, dan Rina Trisnawati, “Pengaruh Asimetri Informasi dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Praktik Earnings Management (Kajian Perbandingan Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks Syariah dan Indeks Konvensional Bursa Efek Indonesia),” *Proceeding Seminar Nasional dan Call For Papers Sancall*, 2013, 978–79.

¹¹¹ Fitri Hayati dan Gusnardi, “Pengaruh Penerapan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi pada BUMN di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2009).”

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dian Agustia (2013), Indah dan Diah (2018), Eny Kusumawati (2019) yang menyatakan bahwa *free cash flow* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian telah sesuai dengan teori bahwa *free cash flow* berpengaruh terhadap manajemen laba, dimana perusahaan yang memiliki arus kas bebas yang tinggi cenderung akan mengurangi niat pihak manajemen untuk melakukan aktivitas manajemen laba. Arus kas bebas (*free cash flow*) adalah arus kas aktual yang dapat didistribusikan kepada investor setelah perusahaan melakukan semua investasi dan modal kerja yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasionalnya.

Pengaruh negatif *free cash flow* terhadap manajemen laba dikarenakan *free cash flow* merupakan determinan penting dalam penentuan nilai perusahaan, sehingga manajer perusahaan lebih terfokus pada usaha untuk meningkatkan *free cash flow* yang menjadi fokus sebagian besar investor pada informasi arus kas perusahaan. Informasi *cash flow* mampu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membagikan dividen. Pada arus kas yang tinggi, perusahaan telah mampu meningkatkan harga saham karena investor melihat bahwa perusahaan tersebut mempunyai kelebihan kas untuk pembagian dividen. Semakin besar *free cash flow* yang tersedia dalam suatu perusahaan, maka semakin sehat perusahaan karena memiliki kas yang tersedia untuk pertumbuhan, pembayaran hutang, dan dividen. Hal ini juga berarti bahwa semakin kecil nilai *free cash flow* yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan tersebut bisa dikategorikan semakin tidak sehat. Oleh karena sebagian besar investor lebih berfokus pada informasi *free cash flow* perusahaan maka pada perusahaan dengan nilai *free cash flow* yang tinggi cenderung tidak akan melakukan manipulasi laba.¹¹²

¹¹² Agustia, "Pengaruh Free Cash Flow dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba."

4.2.5 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Pengujian hipotesis terakhir yaitu apakah terdapat pengaruh positif dari perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 0,820 dan nilai signifikansi sebesar 0,418. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan H_5 ditolak yang artinya besar ataupun kecilnya suatu perencanaan pajak tidak mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Eny Kusumawati (2019), Sari, *et al.*(2018) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak mempengaruhi manajemen laba. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Negara dan Suputra (2017), Febrian, *et al.*(2018), Ayem dan Arifah (2019) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini disebabkan karena tarif pajak tunggal untuk wajib pajak badan pada tahun 2010 turun dari 28% menjadi 25% sehingga manajer tidak dapat memaksimalkan peluang untuk melakukan manajemen laba. Selain itu manajer cenderung akan melakukan pengkajian ulang atau memodifikasi perencanaan pajak yang telah dibuat sebelumnya.¹¹³ Salah satu tujuan perencanaan pajak dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba. Pada umumnya, perencanaan pajak merujuk

¹¹³ Nirwanan Sari, Tri Hardiyanto, dan Simamora, "Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017."

kepada proses merekayasa usaha transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah minimal, namun masih dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Apalagi untuk saat ini walaupun terdapat hak untuk membuat perencanaan pajak namun dibatasi dengan aturan perpajakan yang telah sistematis dan transparan sehingga tidak mempengaruhi praktik manajemen laba. Ada tidaknya perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.¹¹⁴

¹¹⁴ Kusumawati, "Determinan Manajemen Laba: Kajian Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Go Publik Di Bursa Efek Indonesia."

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh dari dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, *free cash flow*, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Free Cash Flow*, dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus pada Perusahaan BUMN yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)”**, antara lain sebagai berikut:

1. Variabel dewan komisaris independen menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap manajemen laba yang diproksikan dengan *discretionary accruals* pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. Hal ini disebabkan oleh kesulitan yang dialami anggota dewan komisaris maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya akibat perubahan jumlah dan susunan dewan komisaris. Selain itu pengangkatan dewan komisaris independen berdasarkan hasil RUPS dan dipilih pemegang saham mayoritas, sehingga walau persentase dewan komisaris independen relatif besar namun tidak dapat benar-benar bertindak independen dan melakukan pengawasan dengan efektif.
2. Variabel kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap manajemen laba yang diproksikan dengan *discretionary accruals* pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. Hal ini disebabkan karena peran kepemilikan institusional hanya sebagai pemilik sementara yang lebih

terfokus pada *current earning*, sehingga memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba dalam jangka pendek.

3. Variabel komite audit menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap manajemen laba yang diproksikan dengan *discretionary accruals* pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. Dengan demikian besar kemungkinan adanya komite audit penerapannya belum dapat menegakkan *good corporate governance*, sebab terdapat kemungkinan hanya dilakukan sebatas untuk pemenuhan regulasi saja.
4. Variabel *free cash flow* menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba yang diproksikan dengan *discretionary accruals* pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. Maka semakin besar nilai *free cash flow* akan semakin kecil praktik manajemen laba dilakukan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar investor lebih berfokus pada informasi *free cash flow* maka pada perusahaan dengan nilai *free cash flow* yang tinggi cenderung tidak akan melakukan manipulasi laba, sebab manajer perusahaan lebih terfokus pada usaha untuk meningkatkan *free cash flow* yang menjadi fokus sebagian besar investor pada informasi arus kas perusahaan
5. Variabel perencanaan pajak menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap manajemen laba yang diproksikan dengan *discretionary accruals* pada perusahaan BUMN yang *listing* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. Dengan demikian, manajer tidak dapat memaksimalkan peluang untuk melakukan manajemen laba akibat adanya perubahan tarif wajib pajak badan.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini belum menghasilkan kesimpulan yang sempurna. Hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian, antara lain yaitu:

1. Variabel dalam penelitian ini masih terbatas yaitu menggunakan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, *free cash flow*, dan perencanaan pajak untuk mengetahui adanya tindakan manajemen laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Periode penelitian dalam hal ini hanya selama 5 tahun sehingga masih kurang untuk mampu menjelaskan secara spesifik dan komprehensif terkait pengaruh variabel dalam penelitian. Selain itu tidak semua data dimasukkan dalam penelitian, sebab terdapat data outlier.
3. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan milik pemerintah yakni dalam hal ini dibawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga masih terdapat banyak perusahaan lain yang dapat memungkinkan terjadi perubahan kesimpulan yang diperoleh.

5.3 Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas *good corporate governance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia maupun tidak, maka peneliti memberikan saran atau rekomendasi kepada penelitian selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Praktisi

Diharapkan pihak praktisi agar dapat lebih serius lagi menghadapi topik terkait masalah manajemen laba. Karena jika terjadi kegagalan dalam mendeteksi manajemen laba tentunya akan sangat berdampak kepada kepercayaan publik dan investor, serta dapat menyebabkan keraguan akan kredibilitas dan integritas profesi akuntan. Selain itu diharapkan penerapan *good corporate governance* kedepannya dapat dilakukan dengan maksimal dalam pelaksanaannya, bukan hanya sebatas untuk memenuhi aturan yang ada. Selain itu bagi perusahaan agar dapat memperhatikan proses rekrutmen, dan latar belakang bidang pendidikan

dewan komisaris independen dan komite audit sehingga kinerjanya dapat lebih maksimal dan efektif, bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan peraturan perundang-undangan dan aturan yang ada.

2. Bagi Instansi

Bagi instansi diharapkan kedepannya dalam melakukan perekrutan tenaga kerja, maupun pihak manajemen dapat diisi oleh orang-orang yang profesional dan ditempatkan sesuai dengan bidang dan keahliannya. Selain itu, diharapkan agar pengimplementasian *good corporate governance* dalam perusahaan BUMN dapat dijalankan seefisien dan efektif mungkin sehingga tercipta tata kelola perusahaan yang baik.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi tambahan terkait topik kajian manajemen laba, dan variabel-variabel yang mempengaruhinya, dan dapat pula dijadikan sebagai referensi selanjutnya terkait manajemen laba, *good corporate governance*, *free cash flow*, dan perencanaan pajak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan pada penelitian berikutnya dapat menambah variabel independen lain yang dapat mengukur secara spesifik dan komprehensif terhadap tindakan manajemen laba pada suatu perusahaan. Selain itu bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah interval jangka waktu yang lebih panjang dari penelitian ini, serta menambah populasi perusahaan yang dijadikan sampel penelitian mengingat pada penelitian ini hanya menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Ferry, dan Anna Purwaningsih. "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Nonmanufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *MODUS* 26, no. 1 (2014): 33–50. <https://doi.org/10.24002/modus.v26il.576>.
- Agoes, Sukrisno, dan Cenik Ardana. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Agustia, Dian. "Pengaruh Free Cash Flow dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba." *AKRUAL* 4, no. 2 (2013): 105–118. <https://doi.org/10.9744/jak.15.1.27-42>.
- Ainun, Nurul. "Praktik Manajemen Laba Efisien dan Kesesuaian Nilai-Nilai Islam pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Skripsi Sarjana Studi Akuntansi*. UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Ambarita, Elfrida, dan Dian Anita Nuswantara. "Pengaruh Penerapan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *AKRUAL* 1, no. 1 (2009): 28–44. <http://dx.doi.org/10.26740/jaj.v1n1.p28-44>.
- Anggraeni, Mariska Dewi. "Agency Theory Dalam Perspektif Islam." *JHI (Jurnal Hukum Islam)* 9, no. 2 (2011): 1–13.
- Arintasari, Okky Widya, dan Abdul Rohman. "Pengaruh Diversifikasi Industri, Geografis, dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba." *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 3 (2015): 1–13.
- Ayem, Sri, dan Putri Husna Nur Arifah. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konvergensi IFRS dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017)." *Jurnal Akuntansi dan Pajak Dewantara* 1, no. 2 (2019): 171–80. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.912>.

- Bisnis.com. "Audit BPK terhadap Garuda Indonesia, Ada Temuan Terkait Mahata." Diakses 22 Desember 2019. <https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20190922/98/1151048/audit-bpk-terhadap-garuda-indonesia-ada-temuan-terkait-mahata>.
- BUMN, Kementerian. "No Title." In *Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara*, 3. Jakarta: Kementerian BUMN, 2002.
- Detik.com. "Bank Bukopin Permak Laporan Keuangan Ini Kata BI dan OJK." Diakses 30 Januari 2020. <https://m.detik.com/finance/moneter/d-3994551/bank-bukopin-permak-laporan-keuangan-ini-kata-bi-dan-ojk>, .
- Echdar, Saban. *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Fitri Hayati, Annur, dan Gusnardi. "Pengaruh Penerapan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi pada BUMN di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2009)." *Jurnal Akuntansi* 16, no. 3 (2012): 364–379.
- Fitri, Nila Umailatul. "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu." *Skripsi Sarjana Studi Perbankan Syariah*. UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Gunawan, dan Elona Meita Situmorang. "Pengaruh Dewan Komisaris , Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2015." *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan* 2, no. 2 (2016): 55–62. <http://dx.doi.org/10.35384/jemp.v2i2.102>.
- Husnan, Suad, dan Enny Pudjiastuti. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015.

Indah.R, Vika, Afrizal, dan Enggar Diah P.A. “Determinan Manajemen Laba pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan UNJA* 3, no. 4 (2018): 35–52.

Indonesia, CNBC. “Bobrok dari 2004, Ini Kronologi Jiwasraya Hingga Default.” Diakses 30 Januari 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191228185156-17-126264/bobrok-dari-2004-ini-kronologi-jiwasraya-hingga-default>.

Is’ada Rahmawati, Hikmah. “Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan.” *Accounting Analysis Journal* 2, no. 1 (2013): 9–18. <https://doi.org/10.15294/aaj/v2i1.1136>.

Jensen, Michael C. “Agency Costs of Free Cash Flow , Corporate Finance , and Takeovers.” *American Economic Review* 76, no. 2 (1986): 323–29. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).

Kieso, Donald.E, Jerry.J Weygandt, dan Terry.D Warfield. *Akuntansi Intermediate, Terj.* Jilid I. Jakarta: Erlangga, 2007.

Kompas.com. “5 Fakta Baru Kasus Jiwasraya, Laba Semu hingga Janji Jaksa Agung Ungkap Tersangka.” Diakses 30 Januari 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/07172091/5-fakta-baru-kasus-jiwasraya-laba-semu-hingga-janji-jaksa-agung-ungkap?page=all>.

———. “Laporan Keuangan Bukopin ‘Tersandung’ Kasus Kartu Kredit, Ini Penjelasan Dirut.” Diakses 30 Januari 2020. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/03/070000026/laporan-keuangan-bukopin-tersandung-kasus-kartu-kredit-ini-penjelasan-dirut?amp=1&page=2>.

Kontan.co.id. “Kementerian BUMN Akan Tindak Auditor Waskita Karya.” Diakses 31 Januari 2020.

<https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/kementerian-bumn-akan-tindak-auditor-waskita-karya-1>.

Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Kusmayadi, Dedi. *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015.

Kusumaningtyas, Metta, dan Dessy Noor Farida. “Pengaruh Kompetensi Komite Audit, Aktivitas Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba.” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 4, no. 1 (2015): 66–82. <http://dx.doi.org/10.30659/jai.4.1.66-82>.

Kusumawati, Eny. “Determinan Manajemen Laba: Kajian Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Go Publik Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 4, no. 1 (2019): 25–42. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i1.6935>.

Kusumawati, Eny, Shinta Permata Sari, dan Rina Trisnawati. “Pengaruh Asimetri Informasi dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Praktik Earnings Management (Kajian Perbandingan Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks Syariah dan Indeks Konvensional Bursa Efek Indonesia).” *Proceeding Seminar Nasional dan Call For Papers Sancall*, 2013, 978–979. <http://hdl.handle.net/11617/3831>.

Latan, Hengky, dan Selva Temalagi. *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Marzuqi, Ahmad Yusuf, dan Achmad Badarudin Latif. “Manajemen Laba dalam Etika Bisnis Islam.” *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 7, no. 1 (2010): 1–22.

Metta.C.W, Annisa. “Analisis Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009.” *Skripsi Sarjana Studi Manajemen*. Universitas Diponegoro, 2010.

Muliasari, Indah, dan Dalili Dianati. "Manajemen Laba Dalam Sudut Pandang Etika Bisnis Islam." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 2, no. 2 (2014): 157–182.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Neraca.co.id. "BAPEPAM Endus ada Penyelewengan Keuangan di Grup Bakrie-Konflik Manajemen Internal Muncul." Diakses 31 Januari 2020. <http://www.neraca.co.id/article/19651/bapem-endus-ada-penyelewengan-keuangan-di-grup-bakrie-konflik-internal-manajemen-muncul>.

Nirwanan Sari, Riska, Arief Tri Hardiyanto, dan Patar Simamora. "Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)* 5, no. 5 (2018): 2.

Octavia, Evi. "Implikasi Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8, no. 1 (2017): 126–36. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7044>.

Pohan, Chairil.A. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Prabowo, Muhammad Shidqon. *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*. Yogyakarta: UII Press, 2018.

Priyastama, Romie. *Buku Sakti Kuasai SPSS*. Yogyakarta: Start Up, 2017.

Puji Puspitasari, Emi, Nur Diana, dan M.Cholid Mawardi. "Pengaruh Faktor Good Corporate Governance, Free Cash Flow dan Leverage Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Batu Bara." *E-JRA* 08, no. 03 (2019): 87–100.

Putri, B.N Lukita, dan Sistya Rachmawati. "Analisis Financial Distress dan Free Cash Flow dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel

Moderasi Terhadap Manajemen Laba.” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 14, no. 2 (2018): 54–61.

Rahardi, Tegar. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 – 2012).” *Skripsi Sarjana Studi Akuntansi*. Universitas Diponegoro, 2013.

Republik Indonesia, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid II. Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf UII, 1995.

Ross, Stephen A, Randolph W Westerfield, Bradford D Jordan, Joseph Lim, dan Ruth Tan. *Fundamentals of Corporate Finance*. Diedit oleh Catur Sasongko. Jakarta: Salemba Empat, 2015.

Santoso, Singgih. *Mahir Statistik Multivariant dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Setyono, Joko. “Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma).” *Jurnal Muqtasid* 6, no. 1 (2015): 25–40.

Suandy, Erly. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Sulistiyanto, Sri. *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*. Jakarta: PT Grasindo, 2008.

Sutino, Eva Rosa Dewi, dan Moh Khoiruddin. “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Masuk dalam JII (Jakarta Islamic Index) Tahun 2012-2013.” *Management Analysis Journal* 5, no. 3 (2016): 156–66. <https://doi.org/10.15294/maj.v5i3.8274>.

Tambang.co.id. “PT Timah Diduga Membuat Laporan Keuangan Fiktif.” Diakses 31 Januari 2020. <http://www.tambang.co.id/pttimah-diduga-membuat->

laporan-keuangan-fiktif-9640/ .

Thesarani, Nurul Juita. “Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit terhadap Struktur Modal.” *Jurnal Nominal* 6, no. 2 (2017): 1–13.

Utami, Sawutri.B. *Materi Pokok Usaha-Usaha Milik Negara dan Daerah*. Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka, 2017.

Widarjono, Agus. *Analisis Multivariant Terapan dengan Program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.

Yogi, L.M.D Parama, dan I.G.A Eka Damayanthi. “Pengaruh Arus Kas Bebas, Capital Adequacy Ratio dan Good Corporate Governance pada Manajemen Laba.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 15, no. 2 (2016): 1056–1085.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: PERHITUNGAN VARIABEL INDEPENDEN

A. Perhitungan Dewan Komisaris Independen

$$DKI = \frac{\text{jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

| Kode Emiten | Tahun | Jumlah Anggota DKI | Jumlah Dewan Komisaris | Persentase DKI |
|-------------|-------|--------------------|------------------------|----------------|
| ADHI | 2014 | 2 | 6 | 0,33333 |
| ADHI | 2015 | 2 | 6 | 0,33333 |
| ADHI | 2016 | 2 | 6 | 0,33333 |
| ADHI | 2017 | 2 | 6 | 0,33333 |
| ADHI | 2018 | 2 | 6 | 0,33333 |
| ANTM | 2014 | 2 | 6 | 0,33333 |
| ANTM | 2015 | 2 | 6 | 0,33333 |
| ANTM | 2016 | 2 | 6 | 0,33333 |
| ANTM | 2018 | 2 | 6 | 0,33333 |
| PTBA | 2014 | 2 | 6 | 0,33333 |
| PTBA | 2015 | 2 | 6 | 0,33333 |
| JSMR | 2014 | 2 | 6 | 0,33333 |
| JSMR | 2015 | 2 | 6 | 0,33333 |
| JSMR | 2017 | 2 | 6 | 0,33333 |
| KAEF | 2015 | 2 | 5 | 0,40000 |

| | | | | |
|------|------|---|---|---------|
| KAEF | 2016 | 2 | 5 | 0,40000 |
| KAEF | 2017 | 2 | 5 | 0,40000 |
| PTPP | 2015 | 2 | 6 | 0,33333 |
| PTPP | 2016 | 3 | 6 | 0,50000 |
| PTPP | 2017 | 2 | 6 | 0,33333 |
| PTPP | 2018 | 2 | 6 | 0,33333 |
| SMBR | 2016 | 3 | 5 | 0,60000 |
| SMBR | 2017 | 1 | 5 | 0,20000 |
| SMBR | 2018 | 2 | 7 | 0,28571 |
| SMGR | 2016 | 2 | 7 | 0,28571 |
| SMGR | 2017 | 2 | 7 | 0,28571 |
| SMGR | 2018 | 2 | 7 | 0,28571 |
| TINS | 2014 | 2 | 5 | 0,40000 |
| TINS | 2016 | 3 | 6 | 0,50000 |
| TINS | 2017 | 2 | 5 | 0,40000 |
| TINS | 2018 | 2 | 5 | 0,40000 |
| WSKT | 2014 | 2 | 6 | 0,33333 |
| WSKT | 2015 | 2 | 6 | 0,33333 |
| WSKT | 2017 | 2 | 6 | 0,33333 |
| WIKa | 2016 | 2 | 6 | 0,33333 |
| WIKa | 2017 | 2 | 6 | 0,33333 |
| WIKa | 2018 | 3 | 7 | 0,42857 |

B. Perhitungan Kepemilikan Institusional

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki investor institusional}}{\text{Jumlah seluruh saham yang beredar}} \times 100\%$$

| Kode | Tahun | Institusi Domestik | Institusi Asing | Pemerintah | Jumlah Kepemilikan Institusional | Saham yang Beredar | KI |
|------|-------|--------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|--------------------|---------|
| ADHI | 2014 | 438.253.000 | 155.918.000 | 918.680.000 | 1.512.851.000 | 1.801.320.000 | 0,83986 |
| ADHI | 2015 | 788.582.265 | 466.404.583 | 1.816.046.624 | 3.071.033.472 | 3.560.849.376 | 0,86244 |
| ADHI | 2016 | 583.836.083 | 544.589.758 | 1.816.046.624 | 2.944.472.465 | 3.560.849.376 | 0,82690 |
| ADHI | 2017 | 563.846.083 | 544.589.758 | 1.816.046.624 | 2.924.482.465 | 3.560.849.376 | 0,82129 |
| ADHI | 2018 | 711.323.725 | 548.278.778 | 1.816.046.624 | 3.075.649.127 | 3.560.849.376 | 0,86374 |
| ANTM | 2014 | 1.197.464.160 | 787.899.008 | 6.200.000.000 | 8.185.363.168 | 9.538.459.749 | 0,85814 |
| ANTM | 2015 | 2.939.758.913 | 1.367.803.988 | 15.620.000.000 | 19.927.562.901 | 24.030.764.725 | 0,82925 |
| ANTM | 2018 | 4.266.943.199 | 1.573.919.869 | 15.619.999.999 | 21.460.863.067 | 24.030.764.725 | 0,89306 |
| PTBA | 2014 | 301.143.100 | 453.955.660 | 1.498.087.500 | 2.253.186.260 | 2.304.131.850 | 0,97789 |
| PTBA | 2015 | 279.347.552 | 243.182.484 | 1.498.087.500 | 2.020.617.536 | 2.304.131.850 | 0,87695 |
| JSMR | 2015 | 957.156.165 | 1.081.783.235 | 4.760.000.000 | 6.798.939.400 | 6.800.000.000 | 0,99984 |
| JSMR | 2016 | 646.376.895 | 1.118.914.620 | 5.080.509.840 | 6.845.801.355 | 7.257.871.200 | 0,94322 |
| JSMR | 2017 | 922.489.835 | 1.156.725.526 | 5.080.509.840 | 7.159.725.201 | 7.257.871.200 | 0,98648 |
| KAEF | 2015 | 161.903.000 | 184.425.900 | 5.000.000.000 | 5.346.328.900 | 5.554.000.000 | 0,96261 |
| KAEF | 2016 | 292.803.100 | 67.153.400 | 5.000.000.000 | 5.359.956.500 | 5.554.000.000 | 0,96506 |
| KAEF | 2017 | 345.427.500 | 40.691.200 | 5.000.000.000 | 5.386.118.700 | 5.554.000.000 | 0,96977 |
| KAEF | 2018 | 446.937.142 | 33.742.958 | 5.000.000.000 | 5.480.680.100 | 5.554.000.000 | 0,98680 |
| PTPP | 2015 | 1.511.095.402 | 719.642.168 | 2.469.642.760 | 4.700.380.330 | 4.842.436.500 | 0,97066 |
| PTPP | 2016 | 1.306.823.786 | 957.709.962 | 2.469.642.760 | 4.734.176.508 | 4.842.436.500 | 0,97764 |
| PTPP | 2017 | 1.414.683.010 | 1.370.792.146 | 3.161.947.836 | 5.947.422.992 | 6.199.897.354 | 0,95928 |
| PTPP | 2018 | 771.059.178 | 1.852.272.520 | 3.161.947.836 | 5.785.279.534 | 6.199.897.354 | 0,93313 |
| SMBR | 2016 | 1.301.610.100 | 104.570.600 | 7.500.000.000 | 8.906.180.700 | 9.837.678.500 | 0,90531 |
| SMBR | 2017 | 2.092.212.148 | 158.185.600 | 7.500.000.000 | 9.750.397.748 | 9.924.797.283 | 0,98243 |
| SMBR | 2018 | 2.104.469.459 | 132.997.650 | 7.500.000.000 | 9.737.467.109 | 9.932.534.336 | 0,98036 |
| SMGR | 2016 | 549.378.459 | 2.238.369.422 | 3.025.406.000 | 5.813.153.881 | 5.931.520.000 | 0,98004 |
| SMGR | 2017 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| | | 592.843.925 | 2.225.889.221 | 3.025.406.000 | 5.844.139.146 | 5.931.520.000 | 0,98527 |
| SMGR | 2018 | 649.783.828 | 2.197.717.635 | 3.025.406.000 | 5.872.907.463 | 5.931.520.000 | 0,99012 |
| TINS | 2014 | 1.302.433.439 | 666.895.630 | 4.841.053.952 | 6.810.383.021 | 7.447.753.454 | 0,91442 |
| TINS | 2016 | 1.241.317.871 | 723.514.293 | 4.841.053.952 | 6.805.886.116 | 7.447.753.454 | 0,91382 |
| TINS | 2017 | 1.851.585.608 | 721.509.838 | 4.841.053.951 | 7.414.149.397 | 7.447.753.454 | 0,99549 |
| TINS | 2018 | 1.041.406.822 | 655.035.512 | 4.841.053.951 | 6.537.496.285 | 7.447.753.454 | 0,87778 |
| WSKT | 2014 | 619.383.800 | 539.481.700 | 6.549.921.000 | 7.708.786.500 | 9.632.236.000 | 0,80031 |
| WSKT | 2015 | 1.002.335.572 | 847.524.572 | 8.963.697.887 | 10.813.558.031 | 13.572.493.310 | 0,79673 |
| WSKT | 2017 | 2.688.417.922 | 1.914.032.731 | 8.963.697.887 | 13.566.148.540 | 13.573.902.600 | 0,99943 |
| WKA | 2016 | 1.718.538.289 | 970.300.049 | 5.834.850.000 | 8.523.688.338 | 8.969.951.372 | 0,95025 |
| WKA | 2017 | 1.495.004.031 | 783.756.175 | 5.834.850.000 | 8.113.610.206 | 8.969.951.372 | 0,90453 |
| WKA | 2018 | 1.538.418.321 | 684.651.025 | 5.834.850.000 | 8.057.919.346 | 8.969.951.372 | 0,89832 |

C. Perhitungan Komite Audit

Komite audit = jumlah anggota komite audit dalam perusahaan

| Kode Emiten | Tahun | Jumlah Komite Audit |
|-------------|-------|---------------------|
| ADHI | 2014 | 2 |
| ADHI | 2015 | 3 |
| ADHI | 2016 | 3 |
| ADHI | 2017 | 5 |
| ADHI | 2018 | 3 |
| ANTM | 2014 | 4 |
| ANTM | 2015 | 4 |
| ANTM | 2018 | 4 |
| PTBA | 2014 | 4 |
| PTBA | 2015 | 4 |
| JSMR | 2014 | 3 |
| JSMR | 2015 | 3 |
| JSMR | 2017 | 3 |
| KAEF | 2015 | 3 |
| KAEF | 2016 | 4 |
| KAEF | 2017 | 4 |
| KAEF | 2018 | 4 |
| PTPP | 2015 | 3 |
| PTPP | 2016 | 3 |
| PTPP | 2017 | 3 |
| PTPP | 2018 | 3 |
| SMBR | 2016 | 3 |
| SMBR | 2017 | 3 |
| SMBR | 2018 | 3 |
| SMGR | 2016 | 4 |
| SMGR | 2017 | 4 |

| | | |
|------|------|---|
| SMGR | 2018 | 4 |
| TINS | 2014 | 4 |
| TINS | 2016 | 4 |
| TINS | 2017 | 4 |
| TINS | 2018 | 4 |
| WSKT | 2014 | 4 |
| WSKT | 2015 | 4 |
| WSKT | 2017 | 4 |
| WIKA | 2016 | 4 |
| WIKA | 2017 | 4 |
| WIKA | 2018 | 5 |

D. Perhitungan *Free Cash Flow*

$$FCF = \frac{\text{Operating Cash Flow} - \text{Capital Expenditure}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

| Kode Emiten | Tahun | Operating Cash Flow | Capital Expenditure | Free Cash Flow | Aset | FCF/Aset |
|-------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|
| ADHI | 2014 | (978.231.044.800) | (244.674.145.804) | (733.556.898.996) | 10.458.881.684.274 | -0,07014 |
| ADHI | 2015 | 241.052.341.639 | (200.332.698.587) | 441.385.040.226 | 16.761.063.514.879 | 0,02633 |
| ADHI | 2016 | (1.858.973.543.725) | (369.537.917.404) | (1.489.435.626.321) | 20.037.690.162.169 | -0,07433 |
| ADHI | 2017 | (3.208.365.514.894) | (166.382.523.972) | (3.041.982.990.922) | 28.332.948.012.950 | -0,10737 |
| ADHI | 2018 | 70.902.349.063 | (147.616.264.833) | 218.518.613.896 | 30.118.614.769.882 | 0,00726 |
| ANTM | 2014 | 391.684.676.000 | (2.029.767.918.000) | 2.421.452.594.000 | 22.004.083.680.000 | 0,11005 |
| ANTM | 2015 | 488.904.984.000 | (1.737.740.720.000) | 2.226.645.704.000 | 30.356.850.890.000 | 0,07335 |
| ANTM | 2018 | 1.874.578.431.000 | (2.137.853.867.000) | 4.012.432.298.000 | 33.306.390.807.000 | 0,12047 |
| PTBA | 2014 | 1.976.117.000.000 | (724.262.000.000) | 2.700.379.000.000 | 14.860.611.000.000 | 0,18171 |
| PTBA | 2015 | 1.897.771.000.000 | (687.241.000.000) | 2.585.012.000.000 | 16.894.043.000.000 | 0,15301 |
| JSMR | 2014 | 1.759.385.695.000 | (232.164.307.000) | 1.991.550.002.000 | 31.859.962.643.000 | 0,06251 |
| JSMR | 2015 | 1.713.543.029.000 | (174.763.419.000) | 1.888.306.448.000 | 36.724.982.487.000 | 0,05142 |
| JSMR | 2017 | 4.356.185.866.000 | (364.029.309.000) | 4.720.215.175.000 | 79.192.772.790.000 | 0,05960 |
| KAEF | 2015 | 175.966.862.348 | (146.204.582.173) | 322.171.444.521 | 3.434.879.313.034 | 0,09379 |
| KAEF | 2016 | 198.050.928.789 | (370.184.762.823) | 568.235.691.612 | 4.612.562.541.064 | 0,12319 |
| KAEF | 2017 | 5.241.243.654 | (751.823.255.819) | 757.064.499.473 | 6.096.148.972.534 | 0,12419 |
| KAEF | 2018 | 258.254.551.890 | (1.010.690.471.335) | 1.268.945.023.225 | 9.460.427.317.681 | 0,13413 |
| PTPP | 2015 | 25.796.192.779 | (155.599.817.199) | 181.396.009.978 | 19.158.984.502.925 | 0,00947 |
| PTPP | 2016 | 986.831.200.221 | (710.423.340.487) | 1.697.254.540.708 | 31.215.671.256.566 | 0,05437 |
| PTPP | 2017 | 1.462.721.816.743 | (1.519.683.483.524) | 2.982.405.300.267 | 41.782.780.915.111 | 0,07138 |
| PTPP | 2018 | 716.128.002.645 | (1.264.343.790.070) | 1.980.471.792.715 | 52.549.150.902.972 | 0,03769 |
| SMBR | 2016 | 87.306.699.000 | (28.269.686.000) | 115.576.385.000 | 4.368.876.996.000 | 0,02645 |
| SMBR | 2017 | 183.236.105.000 | (35.811.149.000) | 219.047.254.000 | 5.060.337.247.000 | 0,04329 |
| SMBR | 2018 | 64.469.290.000 | (197.888.713.000) | 262.358.003.000 | 5.538.079.503.000 | 0,04737 |
| SMGR | 2016 | 5.180.010.976.000 | (5.065.208.221.000) | 10.245.219.197.000 | 44.226.895.982.000 | 0,23165 |
| SMGR | 2017 | 2.759.935.398.000 | (3.490.943.691.000) | 6.250.879.089.000 | 49.068.650.213.000 | 0,12739 |

| | | | | | | |
|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|
| SMGR | 2018 | 4.462.460.482.000 | (1.790.173.160.000) | 6.252.633.642.000 | 51.155.890.227.000 | 0,12223 |
| TINS | 2014 | (640.782.000.000) | (422.815.000.000) | (217.967.000.000) | 9.843.818.000.000 | -0,02214 |
| TINS | 2016 | 1.090.381.000.000 | (535.037.000.000) | 1.625.418.000.000 | 9.548.631.000.000 | 0,17023 |
| TINS | 2017 | (148.667.000.000) | (779.812.000.000) | 631.145.000.000 | 11.876.309.000.000 | 0,05314 |
| TINS | 2018 | (1.420.759.000.000) | (1.167.128.000.000) | (253.631.000.000) | 15.117.948.000.000 | -0,01678 |
| WSKT | 2014 | (88.710.322.099) | (328.828.488.221) | 240.118.166.122 | 12.542.041.344.848 | 0,01915 |
| WSKT | 2015 | 657.972.066.517 | (938.317.109.390) | 1.596.289.175.907 | 30.309.111.177.468 | 0,05267 |
| WSKT | 2017 | (5.959.562.435.459) | (2.434.808.757.933) | (3.524.753.677.526) | 97.895.760.838.624 | -0,03601 |
| WIKa | 2016 | (1.113.343.805.000) | (389.912.190.000) | (723.431.615.000) | 31.355.204.690.000 | -0,02307 |
| WIKa | 2017 | 1.885.252.166.000 | (996.772.993.000) | 2.882.025.159.000 | 45.683.774.302.000 | 0,06309 |
| WIKa | 2018 | 2.722.531.219.000 | (1.247.565.871.000) | 3.970.097.090.000 | 59.230.001.239.000 | 0,06703 |

E. Perhitungan Perencanaan Pajak

$$\text{Tax Retention Rate} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Pretax Income (EBIT)}} \times 100\%$$

| Kode Emiten | Tahun | Net Income | EBIT | Tax Retention Rate |
|-------------|-------|---------------------|---------------------|--------------------|
| ADHI | 2014 | 331.660.506.417 | 599.556.590.359 | 0,55318 |
| ADHI | 2015 | 465.025.548.006 | 746.091.097.180 | 0,62328 |
| ADHI | 2016 | 315.107.783.135 | 612.622.455.614 | 0,51436 |
| ADHI | 2017 | 517.059.848.207 | 957.281.629.758 | 0,54013 |
| ADHI | 2018 | 645.029.449.105 | 649.504.162.099 | 0,99311 |
| ANTM | 2014 | (743.529.593.000) | (790.792.559.000) | 0,94023 |
| ANTM | 2015 | (1.440.852.896.000) | (1.668.773.924.000) | 0,86342 |
| ANTM | 2018 | 874.426.593.000 | 1.265.501.806.000 | 0,69097 |
| PTBA | 2014 | 1.863.781.000.000 | 2.413.952.000.000 | 0,77209 |
| PTBA | 2015 | 2.037.111.000.000 | 2.663.796.000.000 | 0,76474 |
| JSMR | 2014 | 1.237.014.172.000 | 1.850.661.310.000 | 0,66842 |
| JSMR | 2015 | 1.319.200.546.000 | 2.068.304.233.000 | 0,63782 |
| JSMR | 2017 | 2.093.656.062.000 | 3.250.452.460.000 | 0,64411 |
| KAEF | 2015 | 265.549.762.082 | 354.904.735.867 | 0,74823 |
| KAEF | 2016 | 271.597.947.663 | 383.025.924.670 | 0,70909 |
| KAEF | 2017 | 331.707.917.461 | 449.709.762.422 | 0,73760 |
| KAEF | 2018 | 401.792.808.948 | 577.726.327.511 | 0,69547 |
| PTPP | 2015 | 845.563.301.618 | 1.287.534.051.893 | 0,65673 |
| PTPP | 2016 | 1.148.476.320.716 | 1.165.959.670.199 | 0,98501 |

| | | | | |
|------|------|-------------------|-------------------|---------|
| PTPP | 2017 | 1.723.852.894.286 | 1.792.261.562.466 | 0,96183 |
| PTPP | 2018 | 1.958.993.059.360 | 2.003.090.738.328 | 0,97799 |
| SMBR | 2016 | 259.090.525.000 | 349.280.550.000 | 0,74178 |
| SMBR | 2017 | 146.648.432.000 | 208.947.154.000 | 0,70184 |
| SMBR | 2018 | 76.074.721.000 | 145.356.709.000 | 0,52337 |
| SMGR | 2016 | 4.535.036.823.000 | 5.084.621.543.000 | 0,89191 |
| SMGR | 2017 | 1.650.006.251.000 | 2.253.893.318.000 | 0,73207 |
| SMGR | 2018 | 3.085.704.236.000 | 4.104.959.323.000 | 0,75170 |
| TINS | 2014 | 672.991.000.000 | 1.024.844.000.000 | 0,65668 |
| TINS | 2016 | 251.969.000.000 | 414.970.000.000 | 0,60720 |
| TINS | 2017 | 502.417.000.000 | 716.211.000.000 | 0,70149 |
| TINS | 2018 | 531.349.000.000 | 766.482.000.000 | 0,69323 |
| WSKT | 2014 | 511.570.080.528 | 765.959.248.175 | 0,66788 |
| WSKT | 2015 | 1.047.590.672.774 | 1.117.089.634.740 | 0,93779 |
| WSKT | 2017 | 4.201.572.490.754 | 4.620.646.154.705 | 0,90930 |
| WIKA | 2016 | 1.211.029.310.000 | 1.295.239.236.000 | 0,93499 |
| WIKA | 2017 | 1.356.115.489.000 | 1.462.391.358.000 | 0,92733 |
| WIKA | 2018 | 2.073.299.864.000 | 2.358.628.934.000 | 0,87903 |

LAMPIRAN 2 PERHITUNGAN TOTAL AKRUAL

Total Akrual (TAit) = Laba Bersih – Kas dari Aktivitas Operasi

| Kode Emiten | Tahun | Laba Bersih | Kas Dari Aktivitas Operasi | Total Akrual |
|-------------|-------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| ADHI | 2014 | 331.660.506.417 | (978.231.044.800) | 1.309.891.551.217 |
| ADHI | 2015 | 465.025.548.006 | 241.052.341.639 | 223.973.206.367 |
| ADHI | 2016 | 315.107.783.135 | (1.858.973.543.725) | 2.174.081.326.860 |
| ADHI | 2017 | 517.059.848.207 | (3.208.365.514.894) | 3.725.425.363.101 |
| ADHI | 2018 | 645.029.449.105 | 70.902.349.063 | 574.127.100.042 |
| ANTM | 2014 | (743.529.593.000) | 391.684.676.000 | (1.135.214.269.000) |
| ANTM | 2015 | (1.440.852.896.000) | 488.904.984.000 | (1.929.757.880.000) |
| ANTM | 2018 | 874.426.593.000 | 1.874.578.431.000 | (1.000.151.838.000) |
| PTBA | 2014 | 1.863.781.000.000 | 1.976.117.000.000 | (112.336.000.000) |
| PTBA | 2015 | 2.037.111.000.000 | 1.897.771.000.000 | 139.340.000.000 |
| JSMR | 2014 | 1.237.014.172.000 | 1.759.385.695.000 | (522.371.523.000) |
| JSMR | 2015 | 1.319.200.546.000 | 1.713.543.029.000 | (394.342.483.000) |
| JSMR | 2017 | 2.093.656.062.000 | 4.356.185.866.000 | (2.262.529.804.000) |
| KAEF | 2015 | 265.549.762.082 | 175.966.862.348 | 89.582.899.734 |
| KAEF | 2016 | 271.597.947.663 | 198.050.928.789 | 73.547.018.874 |
| KAEF | 2017 | 331.707.917.461 | 5.241.243.654 | 326.466.673.807 |
| KAEF | 2018 | 401.792.808.948 | 258.254.551.890 | 143.538.257.058 |
| PTPP | 2015 | 845.563.301.618 | 25.796.192.779 | 819.767.108.839 |
| PTPP | 2016 | | | |

| | | | | |
|------|------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1.148.476.320.716 | 986.831.200.221 | 161.645.120.495 |
| PTPP | 2017 | 1.723.852.894.286 | 1.462.721.816.743 | 261.131.077.543 |
| PTPP | 2018 | 1.958.993.059.360 | 716.128.002.645 | 1.242.865.056.715 |
| SMBR | 2016 | 259.090.525.000 | 87.306.699.000 | 171.783.826.000 |
| SMBR | 2017 | 146.648.432.000 | 183.236.105.000 | (36.587.673.000) |
| SMBR | 2018 | 76.074.721.000 | 64.469.290.000 | 11.605.431.000 |
| SMGR | 2016 | 4.535.036.823.000 | 5.180.010.976.000 | (644.974.153.000) |
| SMGR | 2017 | 1.650.006.251.000 | 2.759.935.398.000 | (1.109.929.147.000) |
| SMGR | 2018 | 3.085.704.236.000 | 4.462.460.482.000 | (1.376.756.246.000) |
| TINS | 2014 | 672.991.000.000 | (640.782.000.000) | 1.313.773.000.000 |
| TINS | 2016 | 251.969.000.000 | 1.090.381.000.000 | (838.412.000.000) |
| TINS | 2017 | 502.417.000.000 | (148.667.000.000) | 651.084.000.000 |
| TINS | 2018 | 531.349.000.000 | (1.420.759.000.000) | 1.952.108.000.000 |
| WSKT | 2014 | 511.570.080.528 | (88.710.322.099) | 600.280.402.627 |
| WSKT | 2015 | 1.047.590.672.774 | 657.972.066.517 | 389.618.606.257 |
| WSKT | 2017 | 4.201.572.490.754 | (5.959.562.435.459) | 10.161.134.926.213 |
| WIKA | 2016 | 1.211.029.310.000 | (1.113.343.805.000) | 2.324.373.115.000 |
| WIKA | 2017 | 1.356.115.489.000 | 1.885.252.166.000 | (529.136.677.000) |
| WIKA | 2018 | 2.073.299.864.000 | 2.722.531.219.000 | (649.231.355.000) |

Total AkruaI (TA) dengan Persamaan Regresi OLS

$$TAit / Ait-1 = \alpha(1/ Ait-1) + \beta1(\Delta REVit/ Ait-1) + \beta2(PPEit/ Ait-1) + \varepsilon it$$

| Kode Emiten | Tahun | TAit | ATit-1 | ΔREVit | PPEit | TAit/ ATit-1 | 1/ ATit-1 | ΔREVit/ ATit-1 | PPEit/ ATit-1 | Perkalian Koefisien | | | TAit /Ait-1 |
|-------------|-------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-----------|----------------|---------------|---------------------|---------|---------|-------------|
| | | | | | | | | | | 286,040 | 0,152 | -0,123 | |
| ADHI | 2014 | 1.309,892 | 9.720,962 | (114,602) | 496,096 | 0,13475 | 0,00010 | -0,01179 | 0,05103 | 0,02943 | 0,00179 | 0,00628 | 0,02136 |
| ADHI | 2015 | 223,973 | 10.458,882 | 735,992 | 1.099,427 | 0,02141 | 0,00010 | 0,07037 | 0,10512 | 0,02735 | 0,01070 | 0,01293 | 0,02512 |
| ADHI | 2016 | 2.174,081 | 16.761,064 | 1.674,373 | 1.459,816 | 0,12971 | 0,00006 | 0,09990 | 0,08710 | 0,01707 | 0,01518 | 0,01071 | 0,02154 |
| ADHI | 2017 | 3.725,425 | 20.037,690 | 4.092,235 | 1.520,931 | 0,18592 | 0,00005 | 0,20423 | 0,07590 | 0,01428 | 0,03104 | 0,00934 | 0,03598 |
| ADHI | 2018 | 574,127 | 28.332,948 | 499,322 | 1.573,324 | 0,02026 | 0,00004 | 0,01762 | 0,05553 | 0,01010 | 0,00268 | 0,00683 | 0,00594 |
| ANTM | 2014 | (1.135,214) | 22.032,144 | (1.877,690) | 8.699,660 | 0,05153 | 0,00005 | -0,08523 | 0,39486 | 0,01298 | 0,01295 | 0,04857 | 0,04854 |
| ANTM | 2015 | (1.929,758) | 22.004,084 | 1.110,874 | 12.267,804 | 0,08770 | 0,00005 | 0,05048 | 0,55752 | 0,01300 | 0,00767 | 0,06858 | 0,04790 |
| ANTM | 2018 | (1.000,152) | 30.014,273 | 12.587,649 | 20.128,156 | 0,03332 | 0,00003 | 0,41939 | 0,67062 | 0,00953 | 0,06375 | 0,08249 | 0,00921 |
| PTBA | 2014 | (112,336) | 11.673,932 | 1.868,743 | 3.987,565 | 0,00962 | 0,00009 | 0,16008 | 0,34158 | 0,02450 | 0,02433 | 0,04201 | 0,00682 |
| PTBA | 2015 | 139,340 | 14.860,611 | 767,237 | 5.579,117 | 0,00938 | 0,00007 | 0,05163 | 0,37543 | 0,01925 | 0,00785 | 0,04618 | 0,01908 |
| JSMR | 2014 | (522,372) | 28.064,480 | (1.097,650) | 701,685 | 0,01861 | 0,00004 | -0,03911 | 0,02500 | 0,01019 | 0,00594 | 0,00308 | 0,00117 |
| JSMR | 2015 | (394,342) | 31.859,963 | 674,425 | 913,843 | 0,01238 | 0,00003 | 0,02117 | 0,02868 | 0,00898 | 0,00322 | 0,00353 | 0,00867 |
| JSMR | 2017 | (2.262,530) | 53.500,323 | 18.430,793 | 1.035,922 | 0,04229 | 0,00002 | 0,34450 | 0,01936 | 0,00535 | 0,05236 | 0,00238 | 0,05533 |
| KAEF | 2015 | 89,583 | 3.194,664 | 339,347 | 674,489 | 0,02804 | 0,00031 | 0,10622 | 0,21113 | 0,08954 | 0,01615 | 0,02597 | 0,07971 |
| KAEF | 2016 | 73,547 | 3.434,879 | 951,131 | 1.006,745 | 0,02141 | 0,00029 | 0,27690 | 0,29309 | 0,08328 | 0,04209 | 0,03605 | 0,08931 |
| KAEF | 2017 | 326,467 | 4.612,563 | 443,810 | 1.765,913 | 0,07078 | 0,00022 | 0,09622 | 0,38285 | 0,06201 | 0,01463 | 0,04709 | 0,02955 |
| KAEF | 2018 | 143,538 | 6.096,149 | 1.380,934 | 2.693,682 | 0,02355 | 0,00016 | 0,22653 | 0,44187 | 0,04692 | 0,03443 | 0,05435 | 0,02700 |
| PTPP | 2015 | 819,767 | 14.579,155 | 1.790,002 | 2.989,066 | 0,05623 | 0,00007 | 0,12278 | 0,20502 | 0,01962 | 0,01866 | 0,02522 | 0,01306 |
| PTPP | 2016 | 161,645 | 19.158,985 | 2.241,511 | 3.779,619 | 0,00844 | 0,00005 | 0,11700 | 0,19728 | 0,01493 | 0,01778 | 0,02427 | 0,00845 |
| PTPP | 2017 | 261,131 | 31.215,671 | 5.043,375 | 5.789,644 | 0,00837 | 0,00003 | 0,16157 | 0,18547 | 0,00916 | 0,02456 | 0,02281 | 0,01091 |
| PTPP | 2018 | 1.242,865 | 41.782,781 | 3.617,301 | 6.605,379 | 0,02975 | 0,00002 | 0,08657 | 0,15809 | 0,00685 | 0,01316 | 0,01944 | 0,00056 |
| SMBR | 2016 | 171,784 | 3.268,668 | 61,560 | 3.480,075 | 0,05255 | 0,00031 | 0,01883 | 1,06468 | 0,08751 | 0,00286 | 0,13096 | 0,04058 |
| SMBR | 2017 | (36,588) | 4.368,877 | 28,717 | 384,449 | 0,00837 | 0,00023 | 0,00657 | 0,08800 | 0,06547 | 0,00100 | 0,01082 | 0,05565 |
| SMBR | 2018 | 11,605 | 5.060,337 | 444,283 | 4.012,559 | 0,00229 | 0,00020 | 0,08780 | 0,79294 | 0,05653 | 0,01335 | 0,09753 | 0,02766 |
| SMGR | 2016 | (644,974) | 38.153,119 | (813,698) | 30.846,750 | 0,01690 | 0,00003 | -0,02133 | 0,80850 | 0,00750 | 0,00324 | 0,09945 | 0,09519 |
| SMGR | 2017 | (1.109,929) | 44.226,896 | 1.679,358 | 32.523,310 | 0,02510 | 0,00002 | 0,03797 | 0,73537 | 0,00647 | 0,00577 | 0,09045 | 0,07821 |
| SMGR | 2018 | (1.376,756) | 49.068,650 | 2.873,962 | 32.748,896 | 0,02806 | 0,00002 | 0,05857 | 0,66741 | 0,00583 | 0,00890 | 0,08209 | 0,06736 |
| TINS | 2014 | 1.313,773 | 8.432,925 | 1.665,557 | 2.017,066 | 0,15579 | 0,00012 | 0,19751 | 0,23919 | 0,03392 | 0,03002 | 0,02942 | 0,03452 |
| TINS | 2016 | (838,412) | 9.279,683 | 94,102 | 2.221,103 | 0,09035 | 0,00011 | 0,01014 | 0,23935 | 0,03082 | 0,00154 | 0,02944 | 0,00293 |
| TINS | 2017 | 651,084 | 9.548,631 | 2.248,866 | 2.462,393 | 0,06819 | 0,00010 | 0,23552 | 0,25788 | 0,02996 | 0,03580 | 0,03172 | 0,03404 |
| TINS | 2018 | 1.952,108 | 11.876,309 | 1.832,786 | 3.085,182 | 0,16437 | 0,00008 | 0,15432 | 0,25978 | 0,02408 | 0,02346 | 0,03195 | 0,01559 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---------|---------|
| WSKT | 2014 | 600,280 | 8.788,303 | 600,203 | 621,792 | 0,06830 | 0,00011 | 0,06830 | 0,07075 | 0,03255 | 0,01038 | - | 0,00870 | 0,03423 |
| WSKT | 2015 | 389,619 | 12.542,041 | 3.865,940 | 1.923,144 | 0,03107 | 0,00008 | 0,30824 | 0,15334 | 0,02281 | 0,04685 | - | 0,01886 | 0,05080 |
| WSKT | 2017 | 10.161,135 | 61.433,012 | 21.424,575 | 4.742,288 | 0,16540 | 0,00002 | 0,34875 | 0,07719 | 0,00466 | 0,05301 | - | 0,00949 | 0,04817 |
| WIKA | 2016 | 2.324,373 | 19.602,406 | 2.048,731 | 3.324,669 | 0,11858 | 0,00005 | 0,10451 | 0,16961 | 0,01459 | 0,01589 | - | 0,02086 | 0,00962 |
| WIKA | 2017 | (529,137) | 31.355,205 | 10.507,571 | 3.932,109 | 0,01688 | 0,00003 | 0,33511 | 0,12541 | 0,00912 | 0,05094 | - | 0,01542 | 0,04464 |
| WIKA | 2018 | (649,231) | 45.683,774 | 4.981,790 | 4.675,679 | 0,01421 | 0,00002 | 0,10905 | 0,10235 | 0,00626 | 0,01658 | - | 0,01259 | 0,01025 |

LAMPIRAN 3 PERHITUNGAN NON DISCRETIONARY ACCRUALS

$$NDAit = \alpha'(1/Ait-1) + \beta1'(\Delta REVit - \Delta RECit)/Ait-1 + \beta2'(PPEit/Ait-1)$$

| Kode Emiten | Tahun | dalam Miliar Rupiah | | | | | | | Perkalian Koefisien | | | NDAit |
|-------------|-------|---------------------|-------------|-----------|------------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------------|---------|---------|---------|
| | | Ait-1 | Δ.Rev | Δ.Rec | PPEit | 1/ Ait -1 | Δ.Rev- Δ.Rec / Ait-1 | PPEit/ Ait-1 | 286,04 | 0,152 | -0,123 | |
| ADHI | 2014 | 9.720,962 | (114,602) | 450,462 | 496,096 | 0,000103 | (0,058128) | 0,051034 | 0,02943 | 0,00884 | 0,00628 | 0,01431 |
| ADHI | 2015 | 10.458,882 | 735,992 | 277,848 | 1.099,427 | 0,000096 | 0,043804 | 0,105119 | 0,02735 | 0,00666 | 0,01293 | 0,02108 |
| ADHI | 2016 | 16.761,064 | 1.674,373 | 675,250 | 1.459,816 | 0,000060 | 0,059610 | 0,087096 | 0,01707 | 0,00906 | 0,01071 | 0,01541 |
| ADHI | 2017 | 20.037,690 | 4.092,235 | 15,810 | 1.520,931 | 0,000050 | 0,203438 | 0,075903 | 0,01428 | 0,03092 | 0,00934 | 0,03586 |
| ADHI | 2018 | 28.332,948 | 499,322 | 431,720 | 1.573,324 | 0,000035 | 0,002386 | 0,055530 | 0,01010 | 0,00036 | 0,00683 | 0,00363 |
| ANTM | 2014 | 22.032,144 | (1.877,690) | (85,066) | 8.699,660 | 0,000045 | (0,081364) | 0,394862 | 0,01298 | 0,01237 | 0,04857 | 0,04795 |
| ANTM | 2015 | 22.004,084 | 1.110,874 | (619,608) | 12.267,804 | 0,000045 | 0,078644 | 0,557524 | 0,01300 | 0,01195 | 0,06858 | 0,04362 |
| ANTM | 2018 | 30.014,273 | 12.587,649 | (47,273) | 20.128,156 | 0,000033 | 0,420964 | 0,670619 | 0,00953 | 0,06399 | 0,08249 | 0,00897 |
| PTBA | 2014 | 11.673,932 | 1.868,743 | 11,829 | 3.987,565 | 0,000086 | 0,159065 | 0,341579 | 0,02450 | 0,02418 | 0,04201 | 0,00667 |
| PTBA | 2015 | 14.860,611 | 767,237 | 156,179 | 5.579,117 | 0,000067 | 0,041119 | 0,375430 | 0,01925 | 0,00625 | 0,04618 | 0,02068 |
| JSMR | 2014 | 28.064,480 | (1.097,650) | (129,108) | 701,685 | 0,000036 | (0,034511) | 0,025003 | 0,01019 | 0,00525 | 0,00308 | 0,00187 |
| JSMR | 2015 | 31.859,963 | 674,425 | 116,285 | 913,843 | 0,000031 | 0,017519 | 0,028683 | 0,00898 | 0,00266 | 0,00353 | 0,00811 |
| JSMR | 2017 | 53.500,323 | 18.430,793 | 3.269,725 | 1.035,922 | 0,000019 | 0,283383 | 0,019363 | 0,00535 | 0,04307 | 0,00238 | 0,04604 |
| KAEF | 2015 | 3.194,664 | 339,347 | 40,422 | 674,489 | 0,000313 | 0,093570 | 0,211130 | 0,08954 | 0,01422 | 0,02597 | 0,07779 |
| KAEF | 2016 | 3.434,879 | 951,131 | 154,680 | 1.006,745 | 0,000291 | 0,231872 | 0,293095 | 0,08328 | 0,03524 | 0,03605 | 0,08247 |
| KAEF | 2017 | 4.612,563 | 443,810 | 219,968 | 1.765,913 | 0,000217 | 0,048529 | 0,382849 | 0,06201 | 0,00738 | 0,04709 | 0,02230 |
| KAEF | 2018 | 6.096,149 | 1.380,934 | (76,238) | 2.693,682 | 0,000164 | 0,239031 | 0,441866 | 0,04692 | 0,03633 | 0,05435 | 0,02890 |
| PTPP | 2015 | 14.579,155 | 1.790,002 | 627,206 | 2.989,066 | 0,000069 | 0,079757 | 0,205023 | 0,01962 | 0,01212 | 0,02522 | 0,00653 |
| PTPP | 2016 | 19.158,985 | 2.241,511 | 1.670,867 | 3.779,619 | 0,000052 | 0,029785 | 0,197277 | 0,01493 | 0,00453 | 0,02427 | 0,00481 |
| PTPP | 2017 | 31.215,671 | 5.043,375 | 1.694,638 | 5.789,644 | 0,000032 | 0,107277 | 0,185472 | 0,00916 | 0,01631 | 0,02281 | 0,00266 |
| PTPP | 2018 | 41.782,781 | 3.617,301 | 3.992,270 | 6.605,379 | 0,000024 | (0,008974) | 0,158089 | 0,00685 | 0,00136 | 0,01944 | 0,01396 |
| SMBR | 2016 | 3.268,668 | 61,560 | 173,326 | 3.480,075 | 0,000306 | (0,034193) | 1,064677 | 0,08751 | 0,00520 | 0,13096 | 0,04864 |
| SMBR | 2017 | 4.368,877 | 28,717 | 194,925 | 384,449 | 0,000229 | (0,038044) | 0,087997 | 0,06547 | 0,00578 | 0,01082 | 0,04887 |
| SMBR | 2018 | 5.060,337 | 444,283 | 81,574 | 4.012,559 | 0,000198 | 0,071677 | 0,792943 | 0,05653 | 0,01089 | 0,09753 | 0,03011 |
| SMGR | 2016 | 38.153,119 | (813,698) | 294,078 | 30.846,750 | 0,000026 | (0,029035) | 0,808499 | 0,00750 | 0,00441 | 0,09945 | 0,09636 |
| SMGR | 2017 | 44.227 | 1.679,358 | 1.047,748 | 32.523,310 | 0,000023 | 0,014281 | 0,735374 | 0,00647 | 0,00217 | 0,09045 | 0,08181 |
| SMGR | 2018 | 49.069 | 2.873,962 | 900,549 | 32.748,896 | 0,000020 | 0,040217 | 0,667410 | 0,00583 | 0,00611 | 0,08209 | 0,07015 |
| TINS | 2014 | 8.432,925 | 1.665,557 | 398,174 | 2.017,066 | 0,000119 | 0,150290 | 0,239189 | 0,03392 | 0,02284 | 0,02942 | 0,02734 |
| TINS | 2016 | 9.279,683 | 94,102 | 375,949 | 2.221,103 | 0,000108 | (0,030372) | 0,239351 | 0,03082 | 0,00462 | 0,02944 | 0,00323 |
| TINS | 2017 | 9.548,631 | 2.248,866 | 656,819 | 2.462,393 | 0,000105 | 0,166730 | 0,257879 | 0,02996 | 0,02534 | 0,03172 | 0,02358 |
| TINS | 2018 | 11.876,309 | 1.832,786 | 495,915 | 3.085,182 | 0,000084 | 0,112566 | 0,259776 | 0,02408 | 0,01711 | 0,03195 | 0,00924 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|---|---------|---------|
| WSKT | 2014 | 8.788,303 | 600,203 | 596,385 | 621,792 | 0,000114 | 0,000434 | 0,070752 | 0,03255 | 0,00007 | - | 0,00870 | 0,02391 |
| WSKT | 2015 | 12.542,041 | 3.865,940 | 77,612 | 1.923,144 | 0,000080 | 0,302050 | 0,153336 | 0,02281 | 0,04591 | - | 0,01886 | 0,04986 |
| WSKT | 2017 | 61.433,012 | 21.424,575 | 2.669,340 | 4.742,288 | 0,000016 | 0,305296 | 0,077194 | 0,00466 | 0,04640 | - | 0,00949 | 0,04157 |
| WKA | 2016 | 19.602,406 | 2.048,731 | 969,118 | 3.324,669 | 0,000051 | 0,055076 | 0,169605 | 0,01459 | 0,00837 | - | 0,02086 | 0,00210 |
| WKA | 2017 | 31.355,205 | 10.507,571 | 1.183,713 | 3.932,109 | 0,000032 | 0,297362 | 0,125405 | 0,00912 | 0,04520 | - | 0,01542 | 0,03890 |
| WKA | 2018 | 45.683,774 | 4.981,790 | 417,750 | 4.675,679 | 0,000022 | 0,099905 | 0,102349 | 0,00626 | 0,01519 | - | 0,01259 | 0,00886 |

**LAMPIRAN 4 PERHITUNGAN DISCRETIONARY ACCRUALS
(PROKSI VARIABEL DEPENDEN)**

$$DAit = TAit/Ait-1 - NDAit$$

| Kode Emiten | Tahun | TAit /Ait-1 | NDAit | DAit |
|-------------|-------|-------------|----------|----------|
| ADHI | 2014 | 0,02136 | 0,01431 | 0,00705 |
| ADHI | 2015 | 0,02512 | 0,02108 | 0,00404 |
| ADHI | 2016 | 0,02154 | 0,01541 | 0,00613 |
| ADHI | 2017 | 0,03598 | 0,03586 | 0,00012 |
| ADHI | 2018 | 0,00594 | 0,00363 | 0,00231 |
| ANTM | 2014 | -0,04854 | -0,04795 | -0,00059 |
| ANTM | 2015 | -0,04790 | -0,04362 | -0,00428 |
| ANTM | 2018 | -0,00921 | -0,00897 | -0,00024 |
| PTBA | 2014 | 0,00682 | 0,00667 | 0,00015 |
| PTBA | 2015 | -0,01908 | -0,02068 | 0,00160 |
| JSMR | 2014 | 0,00117 | 0,00187 | -0,00070 |
| JSMR | 2015 | 0,00867 | 0,00811 | 0,00056 |
| JSMR | 2017 | 0,05533 | 0,04604 | 0,00929 |
| KAEF | 2015 | 0,07971 | 0,07779 | 0,00192 |
| KAEF | 2016 | 0,08931 | 0,08247 | 0,00684 |
| KAEF | 2017 | 0,02955 | 0,02230 | 0,00725 |
| KAEF | 2018 | 0,02700 | 0,02890 | -0,00190 |
| PTPP | 2015 | 0,01306 | 0,00653 | 0,00653 |
| PTPP | 2016 | 0,00845 | -0,00481 | 0,01326 |
| PTPP | 2017 | 0,01091 | 0,00266 | 0,00825 |
| PTPP | 2018 | 0,00056 | -0,01396 | 0,01452 |
| SMBR | 2016 | -0,04058 | -0,04864 | 0,00806 |
| SMBR | 2017 | 0,05565 | 0,04887 | 0,00678 |
| SMBR | 2018 | -0,02766 | -0,03011 | 0,00245 |
| SMGR | 2016 | -0,09519 | -0,09636 | 0,00117 |
| SMGR | 2017 | -0,07821 | -0,08181 | 0,00360 |
| SMGR | 2018 | -0,06736 | -0,07015 | 0,00279 |
| TINS | 2014 | 0,03452 | 0,02734 | 0,00718 |
| TINS | 2016 | 0,00293 | -0,00323 | 0,00616 |
| TINS | 2017 | 0,03404 | 0,02358 | 0,01046 |
| TINS | 2018 | 0,01559 | 0,00924 | 0,00635 |

| | | | | |
|------|------|---------|---------|---------|
| WSKT | 2014 | 0,03423 | 0,02391 | 0,01032 |
| WSKT | 2015 | 0,05080 | 0,04986 | 0,00094 |
| WSKT | 2017 | 0,04817 | 0,04157 | 0,00660 |
| WIKa | 2016 | 0,00962 | 0,00210 | 0,00752 |
| WIKa | 2017 | 0,04464 | 0,03890 | 0,00574 |
| WIKa | 2018 | 0,01025 | 0,00886 | 0,00139 |

LAMPIRAN 5 OUTPUT HASIL PENGUJIAN DENGAN SPSS 23

Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|---------------------------|----|---------|---------|----------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Dewan Komisaris | 37 | ,20000 | ,50000 | ,3505768 | ,05677182 |
| Independen | | | | | |
| Kepemilikan Institusional | 37 | ,79673 | ,99984 | ,9252768 | ,06441531 |
| Komite Audit | 37 | 2,00 | 5,00 | 3,6216 | ,63907 |
| Free Cash Flow | 37 | -,10737 | ,23165 | ,0590414 | ,07420072 |
| Perencanaan Pajak | 37 | ,51436 | ,99311 | ,7442368 | ,13916916 |
| Discretionary Accruals | 37 | -,00428 | ,01326 | ,0043876 | ,00398378 |
| Valid N (listwise) | 37 | | | | |

Hasil Uji Normalitas: Uji Kolmogorov-Smirnov

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Unstandardized Residual |
| N | | 37 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | ,00347740 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,065 |
| | Positive | ,065 |
| | Negative | -,064 |
| Test Statistic | | ,065 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} |

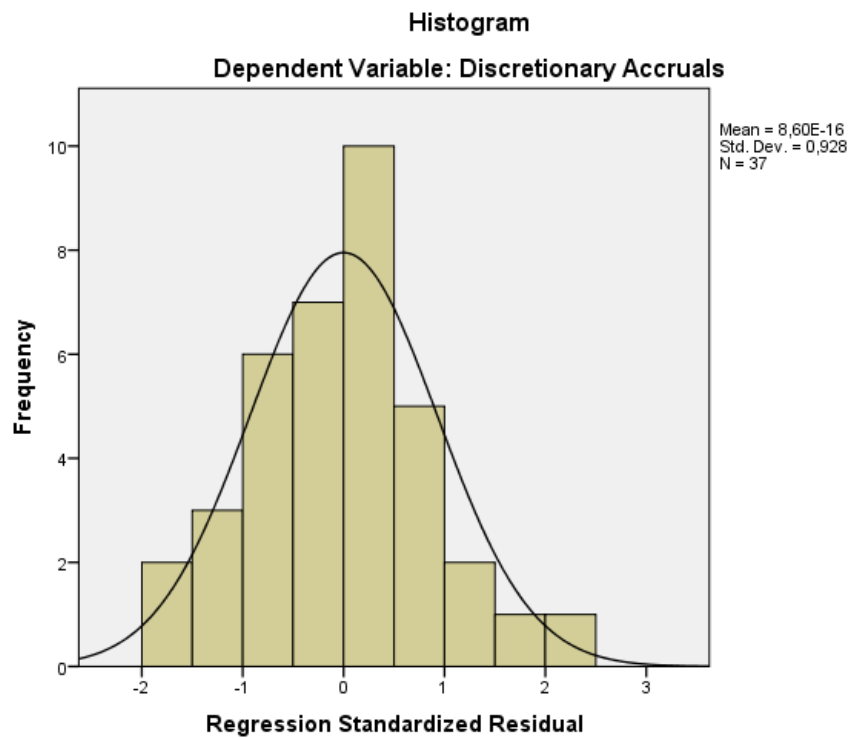
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

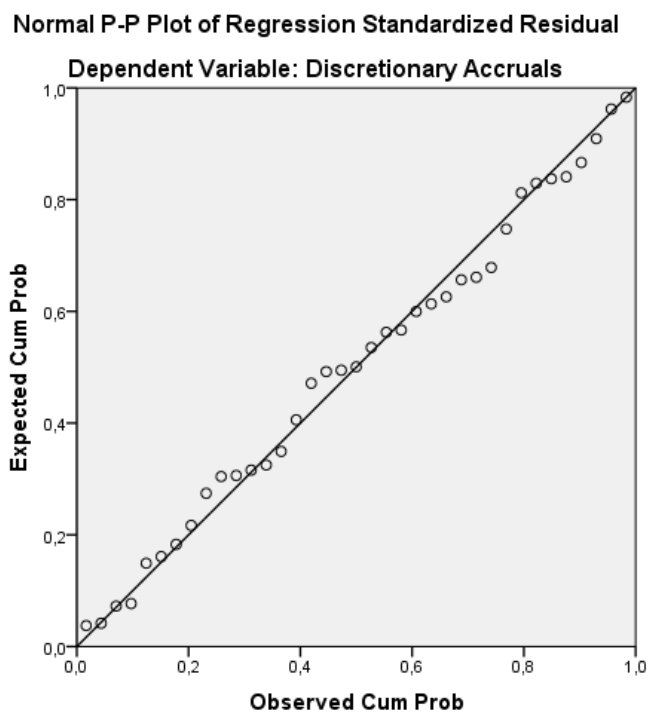
c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil Uji Normalitas: Histogram



Hasil Uji Normalitas: Normal Probability



Hasil Uji Multikolinearitas

| Coefficients ^a | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | -,010 | ,012 | | -,840 | ,407 | | |
| Dewan Komisaris | ,011 | ,011 | ,163 | ,997 | ,327 | ,921 | 1,086 |
| Independen | ,015 | ,011 | ,244 | 1,375 | ,179 | ,780 | 1,282 |
| Kepemilikan Institusional | -,001 | ,001 | -,218 | -1,250 | ,221 | ,806 | 1,241 |
| Komite Audit | -,021 | ,010 | -,400 | -2,162 | ,038 | ,718 | 1,393 |
| Free Cash Flow | ,004 | ,005 | ,139 | ,820 | ,418 | ,860 | 1,163 |
| Perencanaan Pajak | | | | | | | |

a. Dependent Variable: Discretionary Accruals

Hasil Uji Autokorelasi: Uji Durbin Watson

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,488 ^a | ,238 | ,115 | ,00374735 | 1,710 |

a. Predictors: (Constant), Perencanaan Pajak, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Free Cash Flow

b. Dependent Variable: Discretionary Accruals

Hasil Uji Autokorelasi: Uji Run Test

| Runs Test | |
|-------------------------|-------------------------|
| | Unstandardized Residual |
| Test Value ^a | ,00001 |
| Cases < Test Value | 18 |
| Cases >= Test Value | 19 |
| Total Cases | 37 |
| Number of Runs | 17 |
| Z | -,663 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | ,507 |

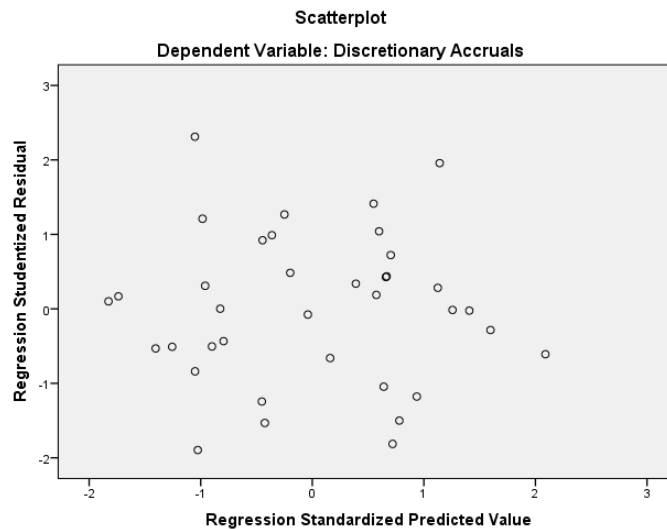
a. Median

Hasil Uji Heteroskedastisitas: Uji Glejser

| Coefficients ^a | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | ,003 | ,007 | | ,457 | ,651 |
| Dewan Komisaris Independen | ,002 | ,007 | ,064 | ,344 | ,733 |
| Kepemilikan Institusional | -,002 | ,007 | -,050 | -,249 | ,805 |
| Komite Audit | ,000 | ,001 | -,057 | -,288 | ,775 |
| Free Cash Flow | ,002 | ,006 | ,069 | ,328 | ,745 |
| Perencanaan Pajak | ,001 | ,003 | ,049 | ,255 | ,801 |

a. Dependent Variable: Abs_Res

Hasil Uji Heteroskedastisitas: Scatterplot



Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary ^b | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square |
| 1 | ,488 ^a | ,238 | ,115 |

a. Predictors: (Constant), Perencanaan Pajak, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Free Cash Flow

b. Dependent Variable: Discretionary Accruals

Hasil Uji t

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | -,010 | ,012 | | -,840 | ,407 |
| Dewan Komisaris | ,011 | ,011 | ,163 | ,997 | ,327 |
| Independen | | | | | |
| Kepemilikan Institusional | ,015 | ,011 | ,244 | 1,375 | ,179 |
| Komite Audit | -,001 | ,001 | -,218 | -1,250 | ,221 |
| Free Cash Flow | -,021 | ,010 | -,400 | -2,162 | ,038 |
| Perencanaan Pajak | ,004 | ,005 | ,139 | ,820 | ,418 |

a. Dependent Variable: Discretionary Accruals

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | -,010 | ,012 | | -,840 | ,407 |
| Dewan Komisaris | ,011 | ,011 | ,163 | ,997 | ,327 |
| Independen | | | | | |
| Kepemilikan Institusional | ,015 | ,011 | ,244 | 1,375 | ,179 |
| Komite Audit | -,001 | ,001 | -,218 | -1,250 | ,221 |
| Free Cash Flow | -,021 | ,010 | -,400 | -2,162 | ,038 |
| Perencanaan Pajak | ,004 | ,005 | ,139 | ,820 | ,418 |

a. Dependent Variable: Discretionary Accruals

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Azizah Setiyawati
NIM : 1605046063
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tgl Lahir : Kendal, 13 September 1997
Alamat : Krajan, RT:04/RW:02, Desa Krikil, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal
Email : setiyawatazizah13@gmail.com
Nama Ayah : Wanuh Soniawan
Nama Ibu : Suwantinah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. SD Negeri 01 Krikil | Tahun Lulus 2009 |
| 2. SMP Negeri 01 Pageruyung | Tahun Lulus 2012 |
| 3. SMK Muhammadiyah 04 Sukorejo | Tahun Lulus 2015 |
| 4. UIN Walisongo Semarang | Tahun Lulus 2020 |

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Kader Ikatan Mahasiswa Kendal (IMAKEN) UIN Walisongo tahun 2016-2017.
2. Anggota Komunitas Bisnis (KOBIS) UIN Walisongo tahun 2017.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Februari 2020

Penulis,



Azizah Setiyawati

NIM : 1605046063

